

# **KONSEPSI DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK**

**Oleh:**

**Abdul Rahman, S.AP, M.A.**

# DEFINISI

*“Analysis is a detailed examination of the elements or structure of something, typically as a basis for discussion and interpretation”.*

(Analisis ialah pemeriksaan rinci dari suatu elemen atau struktur, biasanya sebagai dasar untuk diskusi dan interpretasi).

**(Oxford American Dictionary)**

*“Policy analysis is an applied subfield whose contents cannot be determined by disciplinary boundaries but by whatever appears appropriate to the circumstances of the time and the nature of the problem”.*

(Analisis kebijakan adalah sub-bidang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan oleh batasan disipliner, tetapi oleh apa pun yang tampak sesuai dengan keadaan waktu dan sifat masalah).

**(Wildavsky in Knoepfel et. al, 2007:3)**

**Analisis kebijakan** merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan (*formulation*) suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*).

**(Lembaga Administrasi Negara, 2015:16)**

*“Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the creation, critical assessment, and communication of policy-relevant knowledge. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems”.*

(Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan pada penciptaan, penilaian kritis, dan komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sebagai disiplin pemecahan masalah, ia mengacu pada metode-metode ilmu sosial, teori-teori, dan temuan-temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis).

**(William Dunn, 2017:3)**

# Lanjutan...

*“Policy analysis is located at the junction of previously established knowledge from which it borrows its principal concepts”.*

(Analisis kebijakan terletak di persimpangan pengetahuan yang telah mapan sebelumnya, yang darinya ia meminjam konsep utamanya).

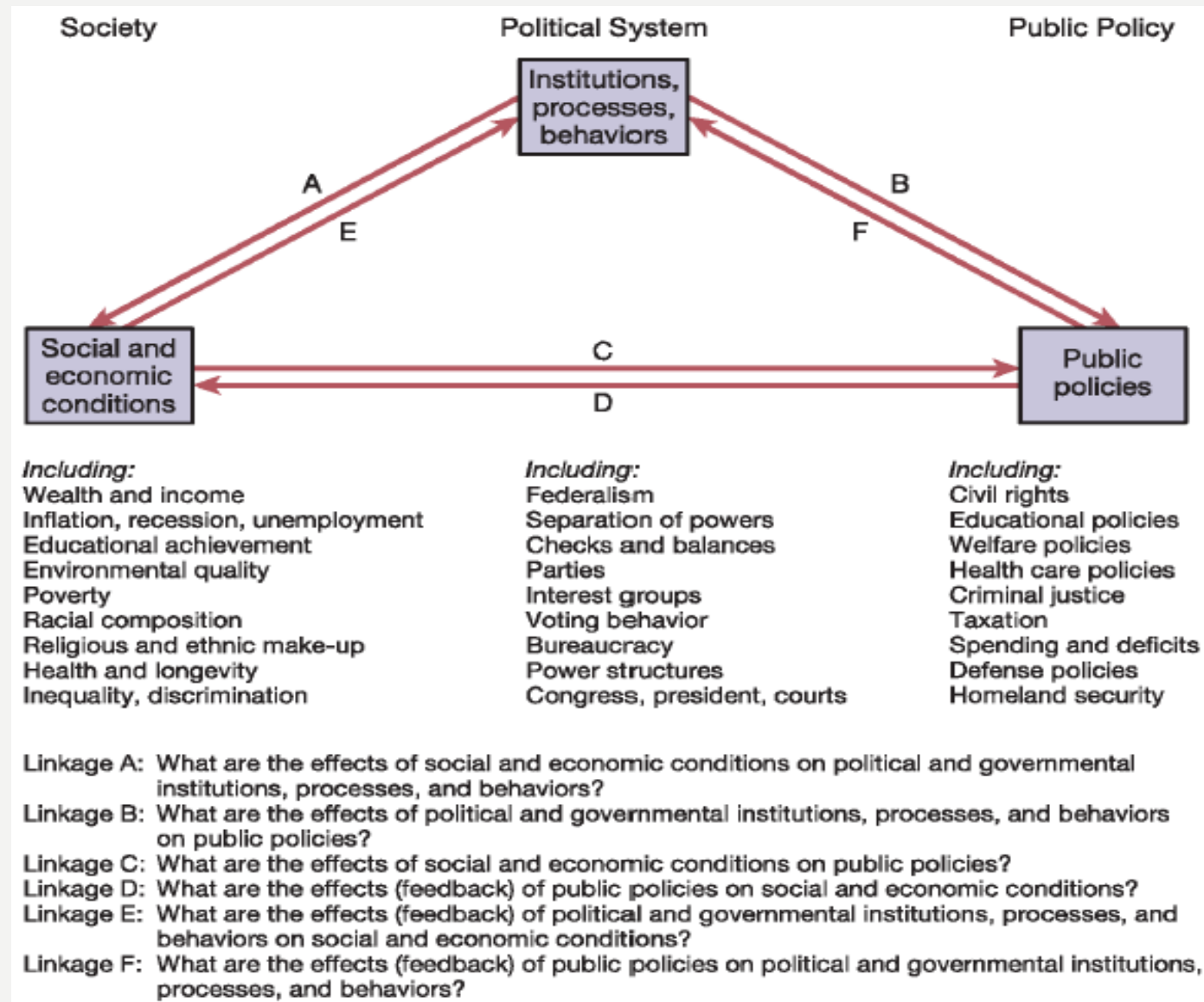
**(Muller, 1990)**

*“Policy analysis is a means of analyzing knowledge “to draw from it policy alternatives and preferences stated in comparable, predicted quantitative and qualitative terms”.*

(Analisis kebijakan adalah sarana untuk menganalisis pengetahuan “untuk mengambil dari alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah yang dapat dibandingkan, diprediksi, baik kuantitatif dan kualitatif”).

**(Walter Williams, 1971)**

# STUDI ANALISIS KEBIJAKAN: SEBAB DAN KONSEKUENSINYA



Sumber: Thomas R. Dye (2013:8)

# PERBEDAAN ANTARA PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN PENELITIAN KEBIJAKAN

No	Social Research	Policy Research
1	Memberikan pencerahan pada bidang keilmuan	Mengembangkan pemahaman terhadap masalah kebijakan
2	Tidak mengembangkan <i>instrument</i> untuk penyelesaian masalah	Mengembangkan <i>instrument</i> /perangkat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
3	Lebih sempit/fokus dan tidak terlalu kompleks	Fenomena yang dibidik lebih luas dan kompleks serta multidisipliner
4	Mencari interpretasi yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dibatasi	Cukup puas dengan 'kebenaran' yang sifatnya umum/relatif kasar.

Sumber: Dunn, dalam LAN (2015:164)

## Posisi Analisis Kebijakan Dibanding dengan Ilmu-ilmu Lain

Paradigma	Tujuan Utama	Klien	Bentuk Uraian	Batasan Waktu	Kelemahan Umum
Penelitian Ilmu Sosial	Membangun teori untuk memahami masyarakat	Kebenaran menurut disiplin ilmu dan penelitian	Metodologi yang tuntas untuk membangun dan menguji teori. Seringkali berdasarkan masa lalu	Jarang ada batasan waktu	Sering tidak relevan dengan informasi yang dibutuhkan pembuat keputusan
Penelitian Kebijakan	Peramalan dampak perubahan variabel yang dapat dikendalikan oleh pemerintah	Pemain dalam arena kebijakan. Disiplin yang berhubungan	Penggunaan metodologi formil untuk menjawab pertanyaan kebijakan yang relevan. Peramalan dari konsekuensi kebijakan	Seringkali tekanan batas waktu, tergantung pada isunya	Kesulitan menerjemahkan penemuan kedalam tindakan pemerintah
Perencanaan Klasik	Mendefinisikan dan menentukan langkah mencapai keadaan masyarakat yang diinginkan di masa depan	Kepentingan umum seperti yang didefinisikan secara profesional	Membuat peraturan dan norma profesional. Menspesifikasikan tujuan dan sasaran	Tidak mendesak untuk diselesaikan segera karena berhubungan dengan masa depan yang jauh di depan	Merupakan "khayalan" dalam perencanaan bila proses politik diabaikan
Public Administration lama	Pelaksanaan program hasil proses politik secara efisien	Program yang dipercayakan	Managerial dan legal	Pembuatan keputusan dan penentuan budget secara rutin	Mengabaikan alternatif diluar program
Journalisme	Memfokuskan perhatian publik pada permasalahan masyarakat	Masyarakat umum	Deskriptif	Harus bertindak ketika isu sedang hangat	Tidak mendalam
Analisis Kebijakan	Menganalisis dan mempresentasikan alternatif yang tersedia buat politikus untuk menyelesaikan masalah masyarakat	Pembuat keputusan tertentu atau pembuat keputusan kolektif	Sintesis penelitian dan teori yang tersedia untuk memperkirakan konsekuensi dari beberapa alternatif keputusan	Penyelesaian analisis biasanya berhubungan dengan keputusan yang spesifik	Pandangan sempit yang diakibatkan oleh orientasi klien dan tekanan waktu

# PERSPEKTIF ANALISIS KEBIJAKAN

## Perspektif Obyektivitas Analisis

- Berorientasi pada **analisis terhadap kebijakan** (*analysis of policy*).
- Mengasumsikan bahwa kebijakan **'bisa'** dan **'harus'** dianalisa secara obyektif. Dengan instrumen-instrumen ilmiah, **analisis dalam perspektif ini diasumsikan sebagai agen yang terbebas dari segala ikatan kontekstual** dan memandang bahwa analisis yang dilakukannya mengandung sebuah kebenaran yang obyektif dan juga *self-evident*.
- Melihat **kebijakan publik hanya sebagai proses teknis-prosedural**. Kebenaran obyektif direduksi menjadi keilmiahan, dan keilmiahan direduksi menjadi seperangkat prosedur ilmiah sehingga diharapkan netralitas analisis kebijakan bisa dijaga.
- Keberhasilannya hanya ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan pelaksanaan **prosedur analisis yang ilmiah**.
- Terdapat kecenderungan untuk terjebak dalam kesempitan cara pandang yang membuat analisis **"tidak (mau) tahu bahwa dia tidak tahu"**.

## Perspektif Inter-Subyektivitas Analisis

- Berorientasi pada **analisis untuk kebijakan** (*analysis for policy*).
- Menekankan pada prinsip bahwa kebenaran selalu bersifat subyektif. Begitu pula dengan analisa, **semua analisa pasti mengandung unsur subyektivitas**. Kebenaran yang obyektif dipandang sebagai *"utopia"*.
- **Tidak berambisi mengejar kebenaran yang bersifat universal**. Analisa dari perspektif ini selalu meletakkan kontekstualitas dan inter-subyektivitas sebagai ukuran utama kebenarannya.
- **Keberpihakan analisis bukan menjadi satu hal yang tabu**, tetapi menjadi suatu keniscayaan proses kebijakan itu sendiri, di mana si analisis adalah salah satu pihak dari sekian banyak kepentingan yang terlibat didalamnya.

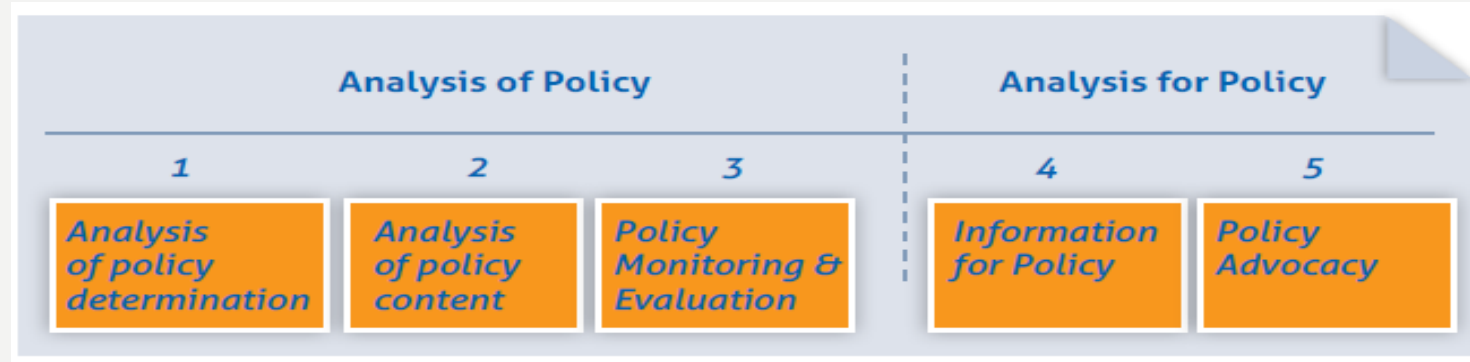
# MATRIKS PERBEDAAN PERSPEKTIF ANALISIS KEBIJAKAN

	ANALISIS SEBAGAI KEGIATAN YANG OBYEKTIF	ANALISIS SEBAGAI KEGIATAN YANG SUBYEKTIF
Asumsi tentang posisi analisis dengan realitas yang dianalisis	Analisis merasa berada di luar realita yang dianalisis	Analisis merasa menjadi bagian dari realitas yang dianalisis
Tipe analisis	Analisis terhadap kebijakan	Analisis untuk kebijakan
Tipikal analis	Ilmuwan, komentator, wartawan	Politisi, <i>policy maker</i> , teknokrat
Peran yang dijalankan Analis	Memproduksi pengetahuan tentang kebijakan	Memproduksi kebijakan
<i>Output</i> yang diharapkan	Pengetahuan, teori, serta penyempurnaan metode analisis kebijakan, orientasi pemerintah	Basis informasi untuk pembuatan kebijakan, tawaran rumusan kebijakan tertentu

Sumber: Nugroho dalam Purwo Santoso (2010:29)



# Perbedaan *Analysis Of Policy* dengan *Analysis For Policy*



## **Analysis of Policy (Analisis Terhadap Kebijakan)**

Yang termasuk dalam kegiatan “*analysis of policy*” adalah analisis terhadap:

- Batasan sebuah kebijakan, yaitu analisis yang difokuskan pada bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa (*target group*) sebuah kebijakan dibuat.
- Isi dari kebijakan, yaitu analisis yang melibatkan deskripsi dari suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dan dalam menganalisisnya dapat pula menggunakan kerangka teoritikal/nilai yang ditujukan untuk memberikan masukan (kritik) terhadap sebuah kebijakan.
- Monitoring dan evaluasi kebijakan, yaitu analisis yang dimaksudkan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar dampak kebijakan bagi problem yang ada.

## **Analysis for Policy (Analisis untuk Kebijakan)**

Kegiatan analisis disini mencakup:

- Dukungan Kebijakan (*Policy advocacy*), yaitu analisis yang mencakup riset dan argumen-argumen yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan baik dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah.
- Informasi bagi sebuah kebijakan (*Information for policy*), yaitu bentuk dari analisis yang dimaksudkan untuk memberikan masukan (*supply informasi*) bagi proses pembuatan kebijakan. Analisis ini dapat berupa kajian/riset mendalam baik secara internal maupun eksternal atau rekomendasi keputusan. Kegiatan ini mungkin dapat membantu dalam menyaring opsi-opsi atau juga menawarkan rekomendasi opsi kebijakan.

# KLASIFIKASI PERAN ANALIS KEBIJAKAN

Peran **Analisis Kebijakan** biasa ditemukan pada:

**Universitas**, yaitu para akademisi yang memiliki perhatian terhadap kebijakan dan problem yang melingkupinya serta proses kebijakan.

**Lembaga Penelitian Independen dan Think Tank**, yaitu dapat berupa pegawai tetap atau partikelir yang terlibat dalam riset tertentu.

**Unit Kebijakan**, yaitu para analis kebijakan yang bertanggung jawab melakukan penelitian dan penyelidikan pada pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah dan institusi publik lainnya.

**Kelompok Penekan & Kelompok Lobby**, dimana Kelompok penekan berusaha mempengaruhi kebijakan dengan cara melakukan pemantauan dan pengembangan ide-ide tentang alternatif kebijakan.

**Partai Politik**, yaitu terdapat departemen/unit yang melakukan riset dan pengembangan kebijakan dalam menunjang kegiatan partai politik.

**Konsultan Tidak Tetap**, yaitu seseorang yang melakukan riset khusus berdasarkan kontrak.

# PERHATIAN YANG HARUS DIMILIKI OLEH ANALIS KEBIJAKAN

1. Perhatian terhadap *problems*/masalah dan hubungan antara kebijakan publik dengan masalah tersebut.

2. Perhatian terhadap *content* (isi) dari kebijakan publik.

3. Perhatian terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pembuat kebijakan (lebih fokus pada *input* dan proses).

4. Perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan dalam kaitannya dengan *output* dan *outcomes*.

## Hubungan antara **Peran Pembuat Kebijakan** dengan **Analisis Kebijakan** dalam Menghasilkan Informasi Kebijakan

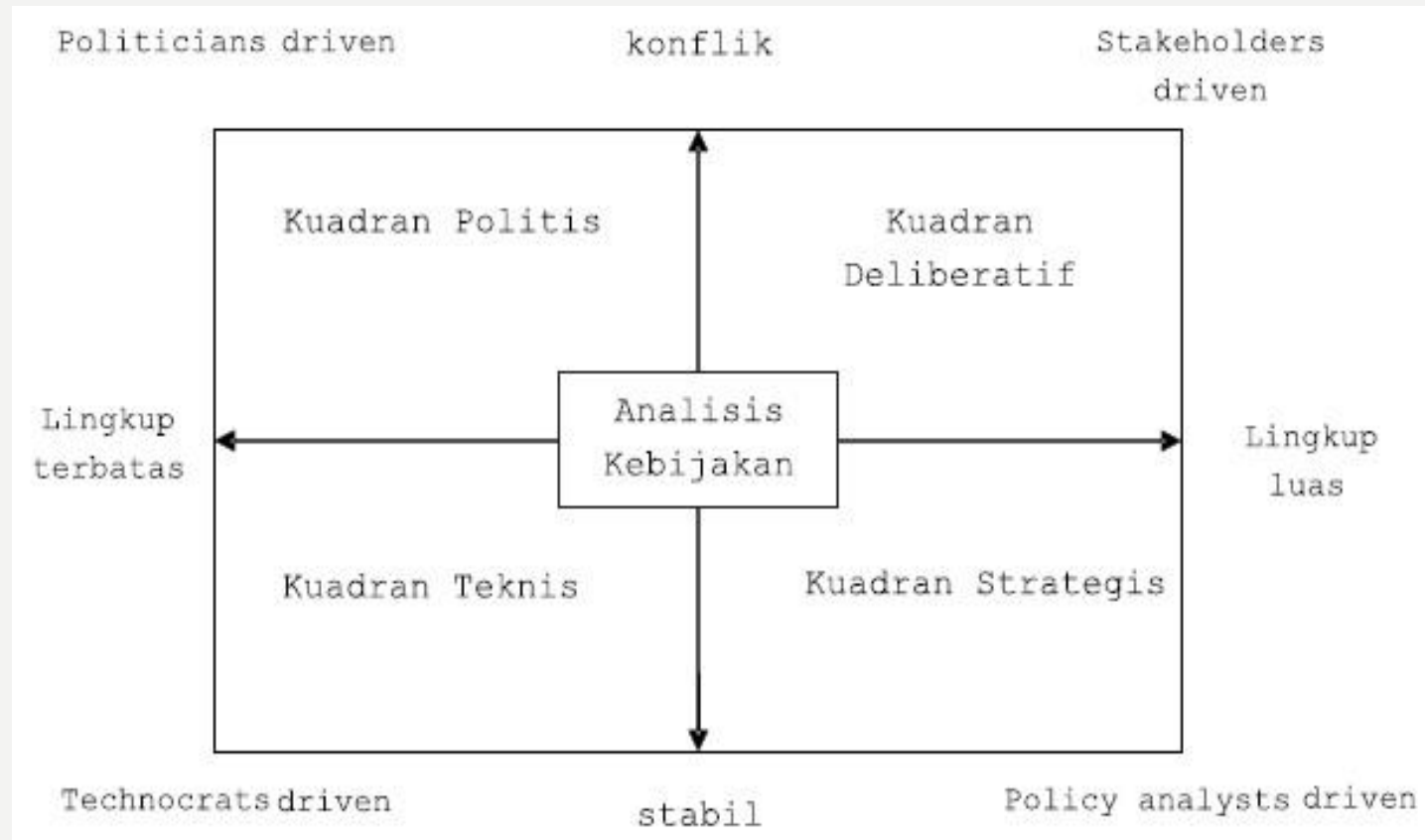


Sumber: Dunn, dalam LAN (2015:19)

## Langkah-langkah Analisis Kebijakan

1. Menentukan atau mendefinisikan masalah kebijakan dengan cara menganalisis data dan informasi yang relevan dengan masalah tersebut (Defining the problem by analyzing the data and the information gathered).
2. Mengidentifikasi atau mengembangkan kriteria-kriteria untuk pemecahan masalah. Dalam hal ini, seorang pengambil kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor terkait sebelum memutuskan sesuatu (Identifying the decision criteria that will be important in solving the problem. The decision maker must determine the relevant factors to take into account when making the decision).
3. Membuat daftar alternatif yang akan dipilih sebagai kebijakan terbaik dalam menyelesaikan masalah kebijakan (A brief list of the possible alternatives must be generated; these could succeed to resolve the problem).
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap kriteria yang dikembangkan, dengan memberikan bobot terhadap setiap kriteria (A critical analyses and evaluation of each criterion is brought through. For example strength and weakness tables of each alternative are drawn and used for comparative basis. The decision maker then weights the previously identified criteria in order to give the alternative policies a correct priority in the decision).
5. Melakukan evaluasi terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian memilih alternatif terbaik sebagai kebijakan terpilih (The decisionmaker evaluates each alternative against the criteria and selects the preferred alternative).
6. Menjalankan kebijakan yang telah dipilih (The policy is brought through).

# KUADRAN ANALISIS KEBIJAKAN



Sumber: Nugroho dalam Purwo Santoso (2010:15)

# PERBEDAAN MODEL-MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENDEKATAN	<i>RATIONAL - COMPREHENSIVE</i>	<i>MIXED-SCANNING</i>	<i>GARBAGE-CAN</i>
POIN PERBEDAAN			
Asumsi ontologis	Setiap permasalahan memiliki solusi obyektif	Setiap permasalahan berada dalam sebuah konteks yang spesifik	Tidak ada solusi yang benar-benar obyektif untuk setiap solusi, karena permasalahan dan pengambilan keputusan selalu terjadi dalam sebuah konteks yang spesifik
Asumsi epistemologis	Pendekatan yang rasional membawa pada pilihan solusi obyektif	Selain keterbatasan nalar manusia, konteks ini membatasi kemungkinan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan melakukan pertimbangan yang komprehensif, sehingga keputusan tidak pernah didasarkan pada perhitungan rasional yang komprehensif.	Pilihan solusi yang diambil didasarkan pada kebiasaan daripada pemikiran yang komprehensif
Sikap terhadap konteks	Hampir sepenuhnya abai terhadap konteks, misal selalu mengasumsikan bahwa informasi yang dibutuhkan akan selalu tersedia secara tidak terbatas	Memberikan perhatian kepada konteks sembari mengupayakan agar proses pengambilan keputusan dalam rasionalitas teknokratis bisa dimaksimalkan	Terlalu hirau dengan konteks, sehingga dalam pengambilan keputusan selalu, terlebih dahulu mengacu pada pengalaman di masa lalu untuk situasi yang dianggap hampir serupa
Logika Proses	Teknokratis	Politis	Birokratis

Sumber: Nugroho dalam Purwo Santoso (2010:17-18)

## Lanjutan...

<b>PENDEKATAN</b>	<i>RATIONAL - COMPREHENSIVE</i>	<i>MIXED-SCANNING</i>	<i>GARBAGE-CAN</i>
<b>POIN PERBEDAAN</b>			
Cakupan analisis	Substansi	Substansi dan proses	Proses
Keputusan yang diharapkan akan dihasilkan	Efektif dan efisien, dengan asumsi klaim ilmiah dan obyektif tidak perlu ditundukkan pada dinamika politik yang ada dalam situasi keputusan kebijakan	Efektif dan efisien, namun juga harus bisa diterima oleh aktor-aktor yang terlibat dan ikut menciptakan situasi keputusan kebijakan	Sesuai dengan keadaan yang dihadapi, namun juga tidak terlalu banyak merubah kebiasaan yang selama ini terlembaga
Posisi analis	Sebagai orang luar yang imparisial	Sebagai bagian yang ikut mempengaruhi proses dan hasil pengambilan keputusan	Sebagai bagian dari sistem yang mereproduksi 'kebiasaan'
Teknik dan metode analisis yang biasa digunakan	CBA, SWOT, <i>Linear programming</i> .	<i>Game theory</i>	<i>Game theory</i>



# PERBANDINGAN *RATIONAL-COMPREHENSIVE, MIXED SCANNING, & GARBAGE CAN*

## *RATIONAL-COMPREHENSIVE*

Mendefinisikan proses kebijakan sebagai proses yang sepenuhnya rasional. Proses kebijakan meliputi aktivitas kalkulasi, proyeksi, perencanaan, dan formulasi yang kompleks. Segala keputusan diambil berdasarkan informasi yang lengkap dan perhitungan yang komprehensif.

## *MIXED SCANNING*

Mengambil posisi di antara keduanya. Model ini mengakui keterbatasan nalar manusia, dan melihat proses kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh perhitungan rasional – efektif – efisien, tetapi juga perhitungan rasional – politis, yang mengakibatkan proses kebijakan diwarnai oleh proses tawar-menawar antar berbagai aktor dan kepentingan yang terlibat. Proses tawar-menawar ini juga dianggap terjadi dalam sebuah konteks sosial yang spesifik, dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang mengkerangkai proses administratif dan politik yang terjadi.

## *GARBAGE CAN*

Melihat proses kebijakan yang sedikit sekali melibatkan proses yang rasional, dalam artian ilmiah. Proses kebijakan lebih digerakkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah dilakukan di masa sebelumnya atau ditempat lain.

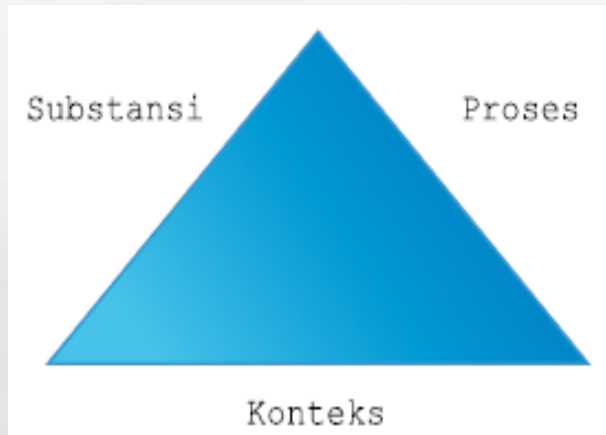
**Terima Kasih**

# **KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN**

**ABDUL RAHMAN, S.AP., M.A.**



# Dimensi Kebijakan



Dimensi kebijakan melihat bahwa dalam kebijakan apapun pasti melekat 3 hal:

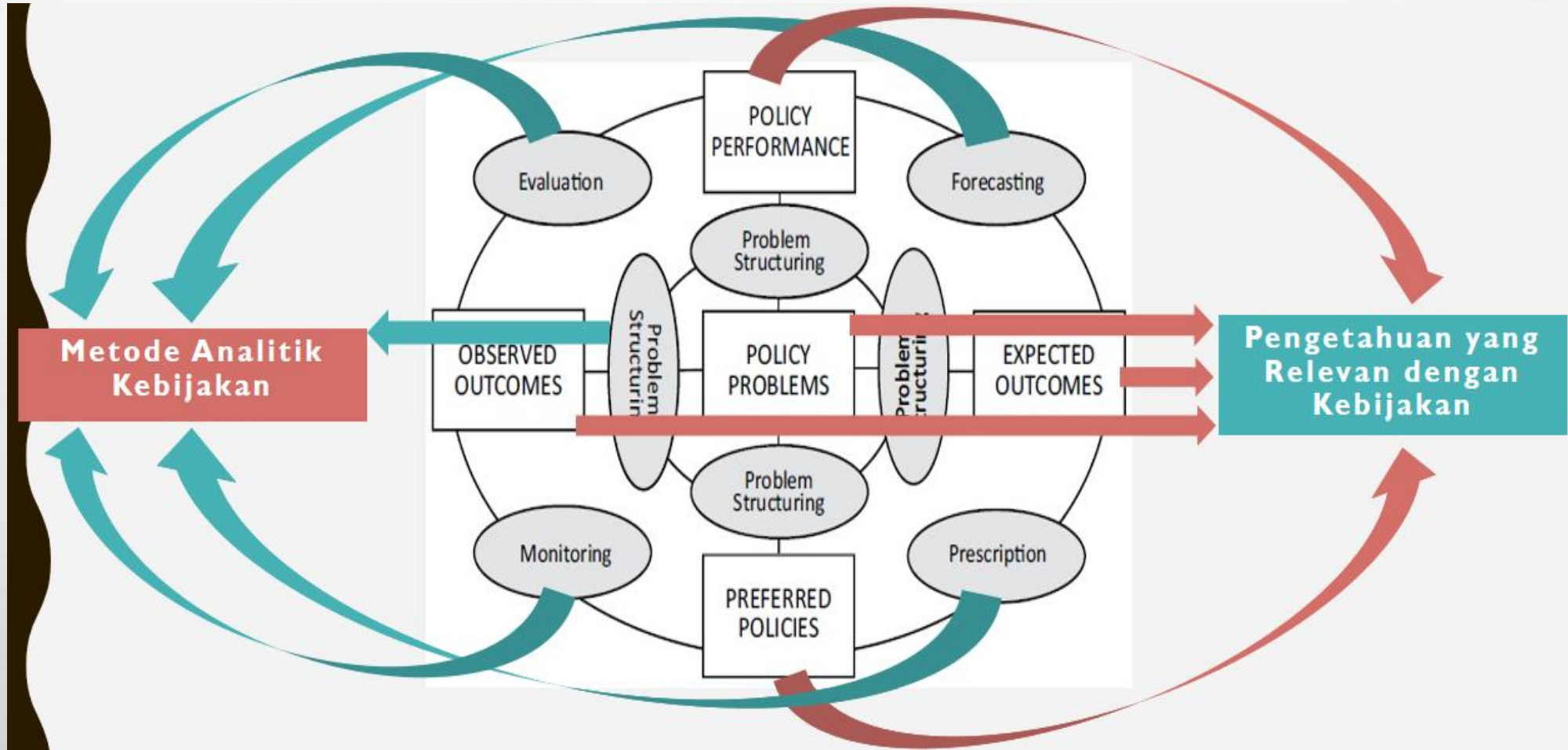
1. **Substansi** atau persoalan yang hendak diatasi;
2. **Proses** yang perlu dilakukan untuk mengatasinya;
3. **Konteks** di mana upaya untuk mengatasi persoalan itu berlangsung.

# Beberapa Pilihan Analisis Kebijakan dan Konsekuensinya

ORIENTASI ANALISIS	PERHATIAN UTAMA	KEUNTUNGAN	POTENSI BIAS/ KERUGIAN
Substansi	Akar persoalan	Menjanjikan efektivitas kebijakan	Dalam hal akar persoalan tidak dipahami berbagai pihak, proses kebijakan yang diperlukan bisa mendapatkan resistensi
Proses	Prosedur teknokrasi dan birokrasi	Proses mudah dikelola	Tidak siap terhadap perubahan situasi, tidak kontekstual, tidak <i>responsif</i>
	Konversi dari <i>input</i> menjadi <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Proses kebijakan diserahkan kepada sistem yang dibakukan	Aktor yang terlibat merasa tidak bertanggung jawab
	Kausalitas	Mengarah pada pokok persoalan	Terjebak dalam kerumitan kausalitas
	Konflik	Menggiring proses konsensus dan memudahkan tindak lanjut	Merepotkan penentu kebijakan
	Pelibatan masyarakat	Mengantisipasi berbagai hal yang tidak sempat dipikirkan pemerintah	Bertele-tele
Konteks	Situasi khusus dan mendesak yang ditemukan	Relevan bagi <i>target group</i> , menghasilkan kehati-hatian pemerintah ( <i>policy maker</i> )	Mengacaukan aturan yang dibakukan, terjebak dalam detail yang tidak selalu konsisten

Sumber: Purwo Santoso (2010:59)

# Kerangka Kerja Multi Disiplin Analisis Kebijakan



Sumber: William Dunn (2017:4-8)

# Pengetahuan yang Relevan dengan Kebijakan

- **Policy Problems.** merupakan representasi dari situasi masalah, yang merupakan rangkaian kekhawatiran yang tersebar yang tidak memiliki solusi yang jelas. pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan membutuhkan pengetahuan tentang kondisi anteseden dari situasi masalah (misalnya, putus sekolah sebagai penyebab pengangguran), serta pengetahuan tentang nilai-nilai (misalnya, sekolah yang aman atau upah layak) yang pencapaiannya dapat mengarah pada definisi masalah dan solusi potensial.
- **Expected Outcomes.** merupakan harapan konsekuensi dari mengadopsi satu atau lebih alternatif kebijakan yang dirancang untuk memecahkan masalah.
- **Preferred Policies.** merupakan solusi potensial untuk suatu masalah. dalam menetapkan alternatif-alternatif kebijakan yang disukai, diperlukan premis-premis faktual dan juga nilai-nilai tertentu seperti: kesetaraan, efisiensi, keamanan, demokrasi, atau nilai lainnya.
- **Observed Outcomes.** merupakan konsekuensi sekarang atau masa lalu dari penerapan kebijakan yang disukai. terkadang terdapat “bias” apakah suatu hasil sebenarnya merupakan efek dari suatu kebijakan.
- **Policy Performance.** merupakan ukuran sejauh mana hasil kebijakan yang diamati berkontribusi pada solusi masalah. dalam praktiknya, kinerja kebijakan tidak pernah sempurna. masalah jarang “diselesaikan secara utuh”; paling sering masalah terselesaikan sebagian sehingga perlu dirumuskan kembali, dan bahkan “tidak terpecahkan”.

# Pertanyaan-pertanyaan dalam Spektrum Kebijakan

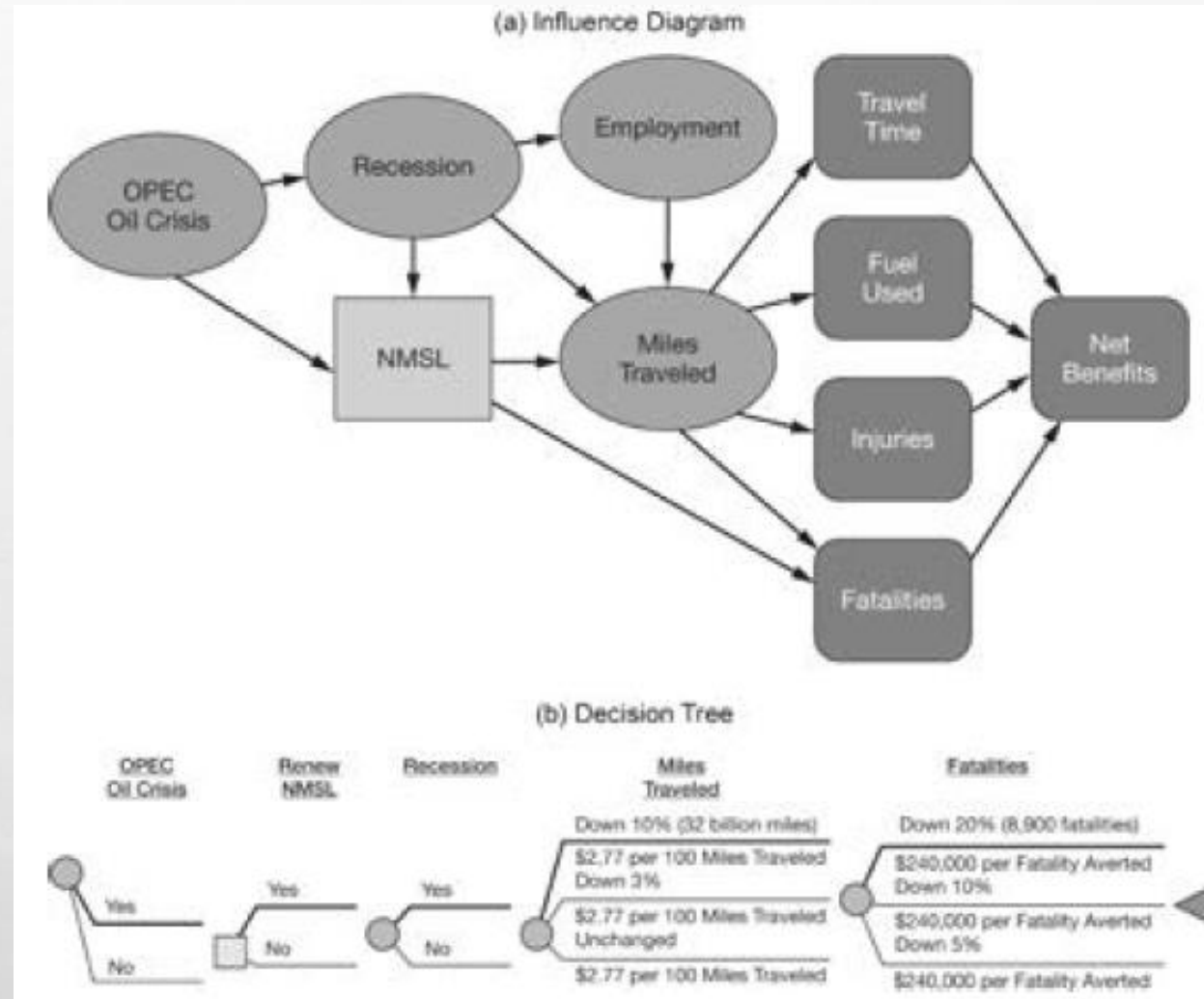
- **Policy Problems.** Apa masalah yang hendak dicari solusi potensialnya? Apakah pemanasan global adalah konsekuensi buatan manusia dari emisi kendaraan, atau konsekuensi dari fluktuasi suhu atmosfer secara berkala? Alternatif apa saja yang tersedia untuk mengurangi pemanasan global? Bagaimana proyeksi hasil dari setiap alternatif dan apa nilai atau kegunaannya?
- **Expected Outcomes.** Apa hasil yang diharapkan dari kebijakan yang dirancang untuk mengurangi emisi berbahaya di masa depan? Karena fluktuasi alamiah berkala sulit atau bahkan tidak mungkin dikendalikan, seberapa besar kemungkinan emisi dapat dikurangi dengan menaikkan harga bensin dan solar atau mengharuskan pesawat menggunakan biofuel?
- **Preferred Policies.** Kebijakan mana yang harus dipilih, dengan mempertimbangkan tidak hanya hasil yang diharapkan dalam mengurangi emisi berbahaya, tetapi juga nilai pengurangan emisi dalam hal biaya dan manfaat moneter? Haruskah keadilan lingkungan dihargai bersama dengan efisiensi ekonomi?
- **Observed Outcomes.** Hasil kebijakan apa yang diamati, atau apa yang membedakan dari hasil yang diharapkan sebelum penerapan kebijakan yang disukai? Apakah kebijakan yang dipilih benar-benar menghasilkan pengurangan emisi, atau apakah penurunan produksi minyak dunia, kenaikan harga bensin, dan pengurangan mengemudi juga mengurangi emisi?
- **Policy Performance.** Sejauh mana kinerja kebijakan telah dicapai, seperti yang didefinisikan oleh hasil kebijakan yang dihargai yang menandakan pengurangan pemanasan global melalui pengendalian emisi? Sampai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai ukuran kinerja kebijakan lainnya, misalnya pengurangan biaya emisi karbon dan pemanasan global untuk generasi mendatang?



# Pertanyaan-pertanyaan dalam Spektrum Kebijakan

- ❖ **Problem Structuring.** Metode penyusunan masalah digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan. metode penataan masalah termasuk diagram pengaruh dan pohon keputusan yang disajikan dalam kasus 1.2 bab 1 ("menggunakan diagram pengaruh dan pohon keputusan untuk menyusun masalah kebijakan energi dan keselamatan jalan raya").
- ❖ **Forecasting.** Metode peramalan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan. contoh dari alat peramalan sederhana adalah kartu skor yang dijelaskan dalam kasus 1.1 (kartu skor goeller dan perubahan teknologi). kartu skor, yang didasarkan pada penilaian para ahli, berguna dalam mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari kebijakan sains dan teknologi.
- ❖ **Prescription.** Metode preskriptif (resep) digunakan untuk menciptakan pengetahuan tentang kebijakan yang disukai. contoh metode preskriptif adalah proses hierarki analitis (*analytical hierarchy process/ahp*) dan analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis/cba*).
- ❖ **Monitoring.** Metode pemantauan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diamati. pemantauan dapat dilakukan secara berkala (misal: per bulan, triwulan, atau per semester).
- ❖ **Evaluation.** Metode evaluasi digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang nilai atau kegunaan hasil kebijakan yang diamati dan kontribusinya terhadap kinerja kebijakan.

# Problem Structuring dengan Model Diagram & Pohon Keputusan



Sumber: William Dunn (2017:26)

## Forecasting dengan Instrumen Kartu Skor (Scorecard)

**TABLE C1.1**

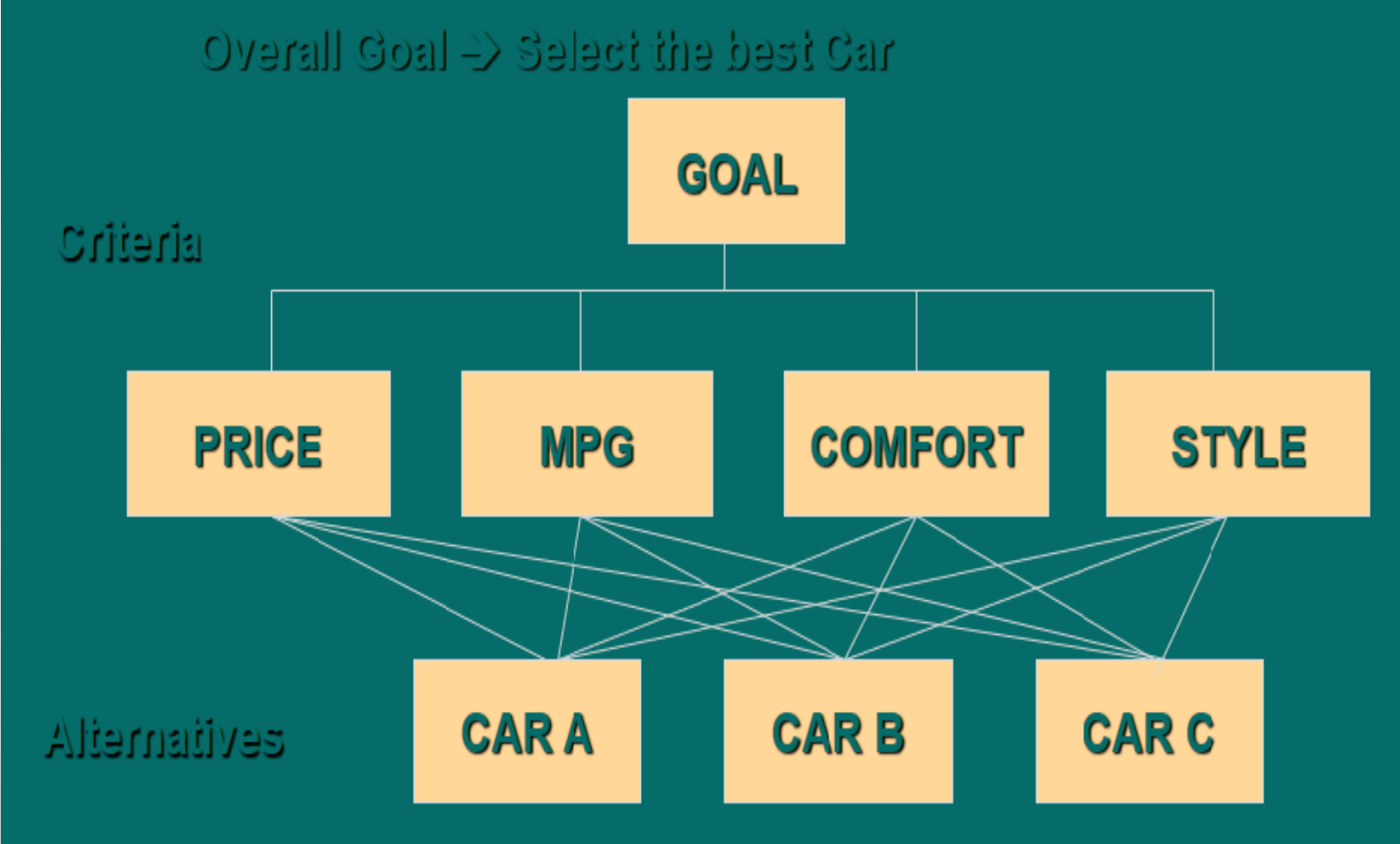
**Scorecard**

Impacts	Conventional Takeoff and Landing Aircraft (CTOL)	Vertical Takeoff and Landing Aircraft (VTOL)	Tracked Air-Cushion Vehicle (TACV)
<b>TRANSPORTATION</b>			
Passengers (million miles)	7	4	9
Per trip time (hours)	2	1.5	2.5
Per trip cost (\$)	\$17	\$28	\$20
Reduced congestion (%)	0%	5%	10%
<b>FINANCIAL</b>			
Investment (\$ millions)	\$150	\$200	\$200
Annual subsidy (\$ millions)	0	0	90
<b>ECONOMIC</b>			
Added jobs (thousands)	20	25	100
Added sales (\$millions)	50	88	500
<b>COMMUNITY</b>			
Noise (households)	10	1	20
Added air pollution (%)	3%	9%	1%
Petroleum savings (%)	0%	-20%	30%
Displaced households	0	20	500
Taxes lost (\$millions)	0	0.2	2
Landmarks destroyed	None	None	Fort X
<b>DISTRIBUTIONAL</b>			
Low-income trips (%)	7%	1%	20%
Low-income household			
Noise-annoyance (%)	2%	16%	40%

Source: Quade (1975): 60.

Sumber: William Dunn (2017:24)

# Prescripriondengan Metode Proses Hierarki Analitis



## Lanjutan...

- Priorities for overall goal

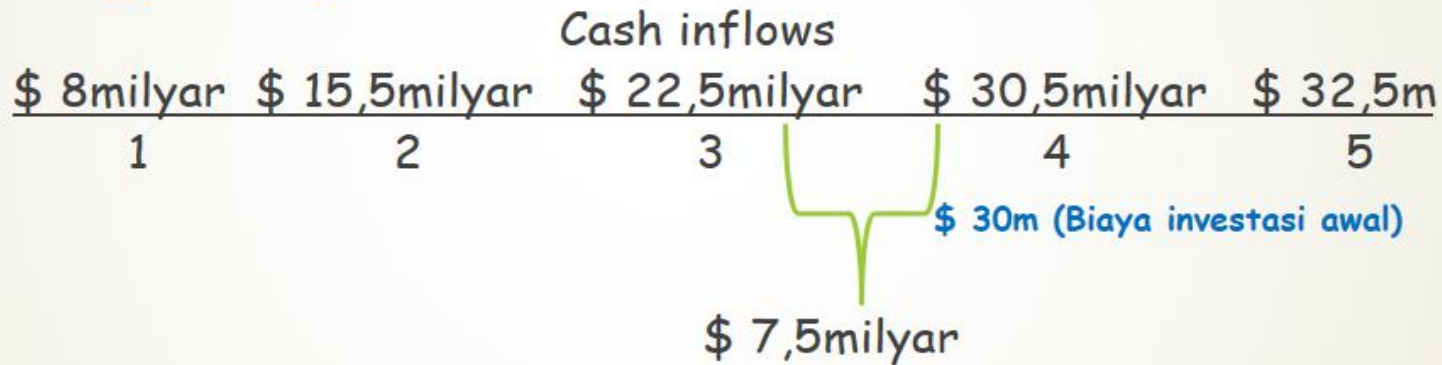
Price	MPG	Comfort	Style
0.398	0.085	0.218	0.299

- Synthesis ( $\Sigma$  Priorities overall x Priorities in AHP-35)
  - Car A =  $0.398 (0.123) + 0.085 (0.087) + 0.218 (0.593) + 0.299 (0.265) = \mathbf{0.265}$
  - Car B =  $0.398 (0.320) + 0.085 (0.274) + 0.218 (0.341) + 0.299 (0.655) = \mathbf{0.421}$  ← Yang Dipilih
  - Car C =  $0.398 (0.557) + 0.085 (0.639) + 0.218 (0.066) + 0.299 (0.080) = \mathbf{0.314}$

## Prescriprion dengan Metode Analisis Biaya Manfaat

Pada proyek pemindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah harus memutuskan apakah menggunakan jasa **Pengembang X** atau **Pengembang Y**. Kedua pengembang memiliki biaya investasi awal yang sama, yaitu **\$ 30 milyar**. Tetapi cash inflows **Pengembang X** bervariasi dari tahun pertama hingga tahun kelima secara berturut-turut: **\$ 8.000.000.000**, **\$ 7.500.000.000**, **\$ 7.000.000.000**, **\$ 8.000.000.000**, dan **\$ 2.000.000.000**. Untuk **Pengembang Y** berturut-turut: **\$ 6.500.000.000**, **\$ 7.000.000.000**, **\$ 6.000.000.000**, **\$ 6.500.000.000** dan **\$ 6.000.000.000**. *Payback period* kedua proyek adalah:

### Pengembang X

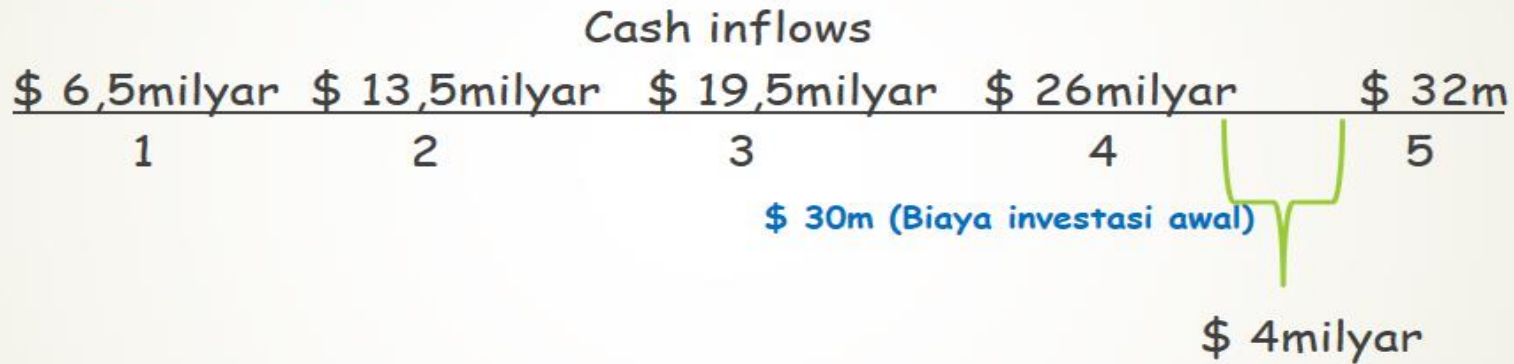


$\$ 7.500.000.000 / (\$ 30,5 \text{ milyar} - \$ 22,5 \text{ milyar}) \times 12 \text{ bulan} = 11,25 \text{ bulan}$   
**Payback period Pengembang X = 3 tahun + 11,25 bulan.**

## Lanjutan...

Untuk Pengembang Y berturut-turut: \$ 6.500.000.000, \$ 7.000.000.000, \$ 6.000.000.000, \$ 6.500.000.000 dan \$ 6.000.000.000. *Payback period* nya adalah:

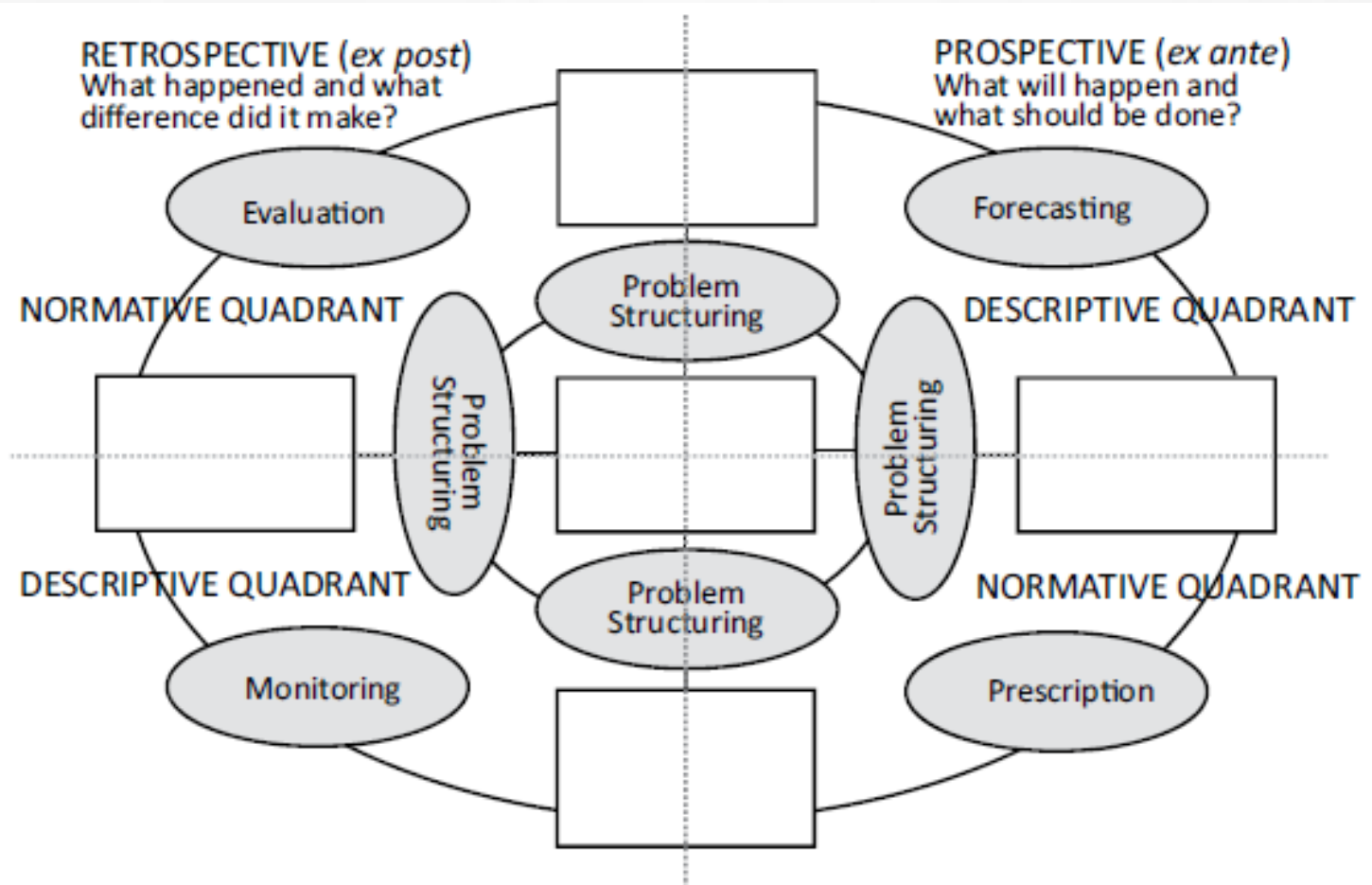
### Pengembang Y



$\$ 4.000.000.000 / (\$ 32 \text{ milyar} - \$ 26 \text{ milyar}) \times 12 \text{ bulan} = 8 \text{ bulan}$   
**Payback period Pengembang Y = 4 tahun + 8 bulan.**

**Kesimpulan: Pengembang X lebih baik dari Pengembang Y.**

# Bentuk Analisis Kebijakan



Sumber: William Dunn (2017:11)



# Perbandingan Analisis Kebijakan Prospektif dan Retrospektif

## Analisis Kebijakan Prospektif

- ✓ Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. model ini dapat disebut sebagai model prediktif.
- ✓ Analisis ini berasal dari penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan.
- ✓ Ciri-cirinya adalah: 1) mengabungkan, memilih dan membandingkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia; 2) meramal secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan kebijakan; 3) secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi.
- ✓ Namun analisis ini sering menimbulkan pertentangan antara pemecahan masalah dengan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.

## Analisis Kebijakan Retrospektif

- ✓ Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.
- ✓ Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil.
- ✓ Beberapa analisis kebijakan restropektif, adalah: 1) Analisis berorientasi disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab akibat kebijakan; 2) Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum; 3) Analisis beriorientasi pada aplikasi (penerapan), menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis.

# Praktik Analisis Kebijakan

Logika yang Direkonstruksi  
vs Logika yang Digunakan

- ❖ Proses analisis kebijakan terintegrasi adalah **rekonstruksi logis** (*reconstructed logic*).
- ❖ Proses melakukan **analisis kebijakan sebenarnya tidak pernah sepenuhnya sesuai dengan rekonstruksi ini**, karena semua rekonstruksi logis adalah abstraksi perilaku dan bukan deskripsi literal tentang perilaku tersebut.
- ❖ Kurangnya kesesuaian ini ditangkap oleh istilah *logic-in-use*, yang mengacu pada “**penyimpangan**” dari integrasi metodologis yang diamanatkan oleh **rekonstruksi logis**.
- ❖ “Penyimpangan” tsb terjadi karena sejumlah faktor, terutama: **1) karakteristik pribadi analis; 2) sosialisasi profesional analis; dan 3) tata kelola kelembagaan tempat analis bekerja.**

*Sumber: William Dunn (2017:15)*

## **Karakteristik Pribadi Analisis**

- Gaya kognitif analisis.

## **Sosialisasi Profesional Analisis**

- Peran analitik.
- Sosialisasi profesional.
- Kerja tim multi disiplin.

## **Tata Kelola Kelembagaan Tempat Analisis Bekerja**

- Sistem insentif kelembagaan.
- Batasan waktu kelembagaan.

# Penjelasan...

- **Gaya Kognitif.** gaya kognitif personal dari para analis mempengaruhi mereka terhadap cara-cara yang berbeda dalam memperoleh, menafsirkan, dan menggunakan pengetahuan.
- **Peran Analitik.** dalam organisasi yang menjadi lokus analisis kebijakan, analis kebijakan idealnya relatif terisolasi dari politik. Jika ini terjadi, mereka dapat disebut sebagai "**teknisi**". namun jika sebaliknya, berarti analis tsb **bersifat politis**, sehingga memiliki kecenderungan untuk lebih berkomitmen untuk memajukan kepentingan para pemimpin politik atau pejabat yang berafiliasi dengan mereka. bahkan, sebagian analis kebijakan publik adalah "**afilior pengusaha**" yang mencari pengaruh lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan untuk kepentingannya.
- **Sosialisasi Profesional.** berbagai disiplin ilmu dan profesi mensosialisasikan anggotanya ke dalam norma dan nilai yang berbeda. Analisis atas dokumen kebijakan yang diterbitkan menunjukkan bahwa para analis menggunakan pendekatan formal-kuantitatif serta informal-naratif.
- **Kerja Tim Multidisiplin.** Banyak analisis yang dilakukan di badan publik dilakukan oleh tim multidisiplin. Ekonom dan Analis keputusan biasanya lebih memenuhi syarat untuk melakukan analisis prospektif (*ex ante*), sedangkan anggota tim yang terlatih dalam ilmu politik, sosiologi, dan evaluasi program biasanya lebih baik dalam analisis retrospektif (*ex post*).
- **Sistem Insentif Kelembagaan.** Kebijakan lembaga "*think tanks*" mendorong orientasi yang berbeda ke arah analisis, termasuk "kritisisme nilai-nilai humanistik" dan "ilmiah". Penghargaan dan hukuman institusional yang diberikan oleh lembaga *think tanks* dan organisasi penelitian profesional lainnya memengaruhi validitas kesimpulan dan rekomendasi.
- **Batasan Waktu Kelembagaan.** Analis yang bekerja di lingkungan pemerintahan seringkali menghadapi kendala waktu institusional yang ketat. Mereka bekerja dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, dan mungkin efisiensi yang lebih besar, daripada analis dalam lingkungan akademis. Hal ini dapat dimaklumi mengingat analis pemerintah jarang mengumpulkan data asli dan kebanyakan tidak menggunakan teknik yang rumit dan memakan waktu.

# Berfikir Kritis & Analisis Kebijakan

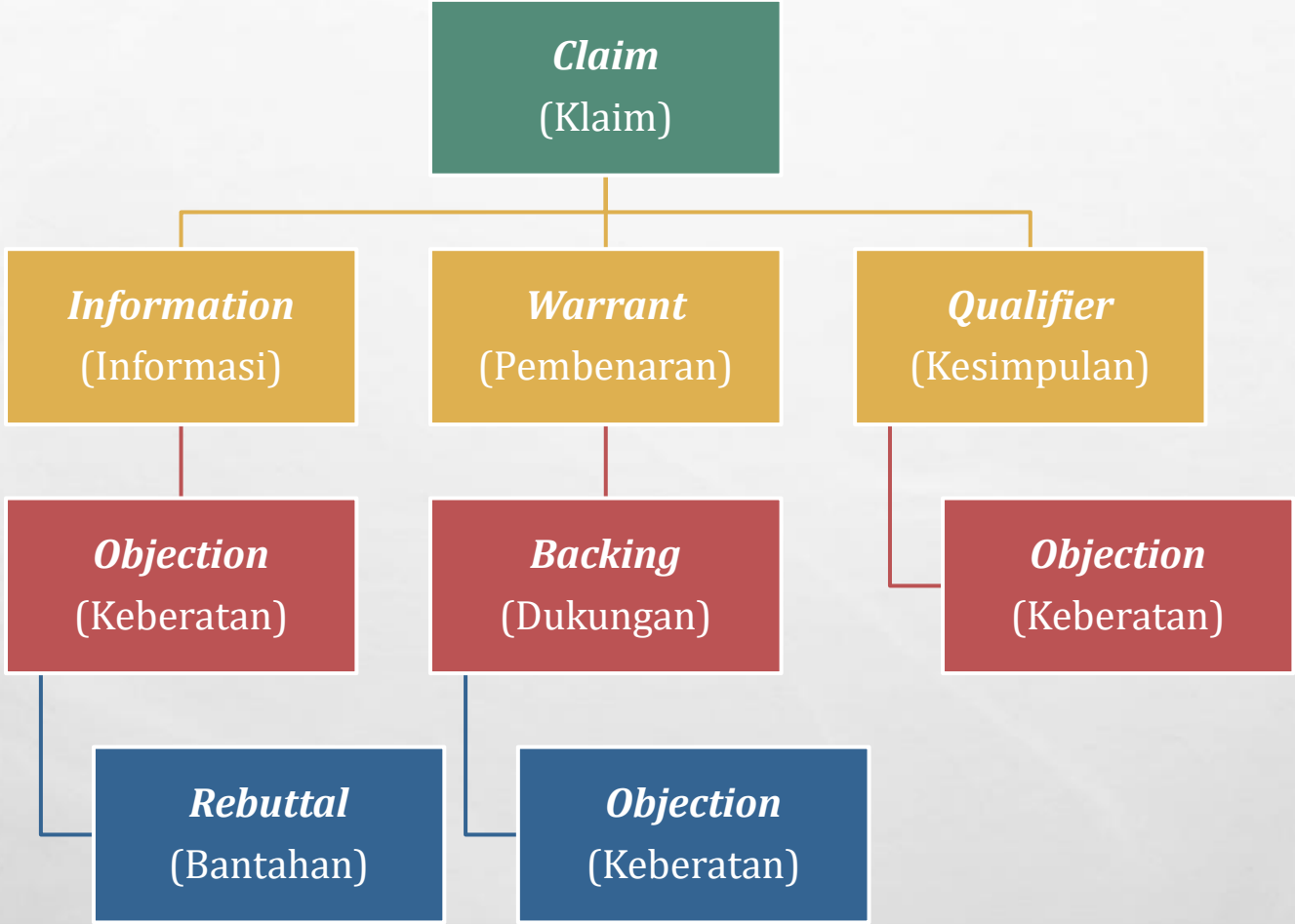
Analisis kebijakan itu **kompleks**, sehingga seorang Analis harus **menyaring volume besar data** yang tersedia, **mengevaluasi sumber data** tsb, **memilih metode analisis** yang sesuai, dan menggunakan **strategi yang efektif** untuk mengkomunikasikan hasil.

Tantangan ini membutuhkan **pemikiran kritis**, yang melibatkan sintesis, dan **evaluasi berbagai alasan** dan **elemen bukti** yang ditawarkan untuk mendukung klaim yang saling bertentangan.

Salah satu metode yang tersedia untuk tujuan ini adalah **analisis argumen kebijakan**. Dengan menganalisis argumen kebijakan, Analis dapat **mengidentifikasi dan menyelidiki asumsi** yang mendasari klaim kebijakan yang bersaing, **mengenali dan mengevaluasi keberatan** terhadap klaim tersebut, dan **mensintesis pengetahuan** dari berbagai sumber.

*Sumber: William Dunn (2017:19)*

# Struktur Argumen Kebijakan



Sumber: William Dunn (2017:20)

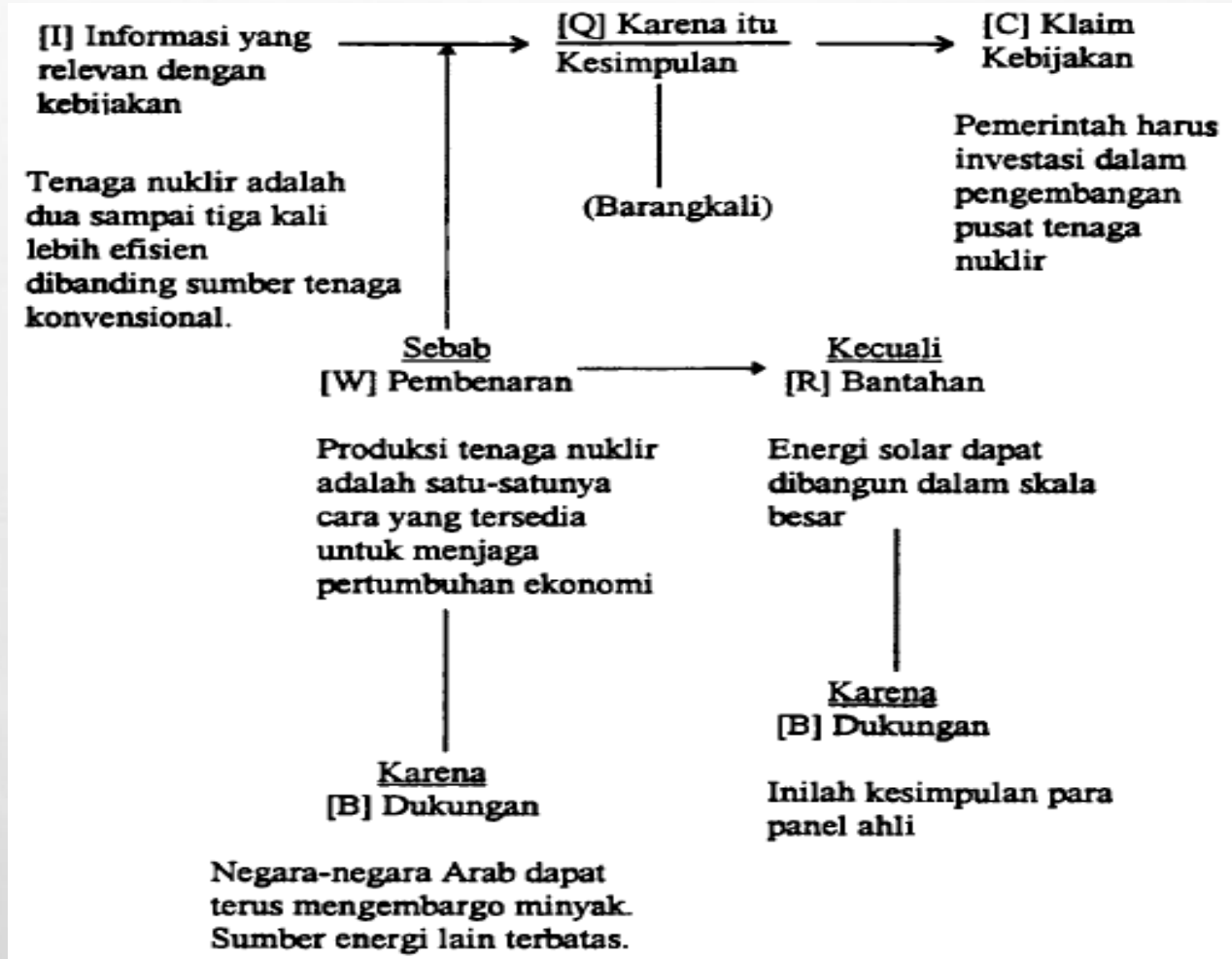
# Penjelasan...

- ❖ **Claim.** Klaim kebijakan adalah kesimpulan dari argumen kebijakan. Terdapat 4 tipe klaim kebijakan: 1) Klaim Definisional ("pengangguran adalah jumlah orang dalam angkatan kerja aktif yang mencari pekerjaan"); 2) Klaim Deskriptif ("penggunaan internet akan berlipat ganda dalam 10 tahun mendatang"); 3) Klaim Evaluatif ("distribusi kesempatan kerja tidak adil"); 4) Klaim Normatif ("kongres harus mengesahkan amandemen undang-undang praktik ketenagakerjaan yang adil").
- ❖ **Information.** Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan memberikan dasar untuk klaim kebijakan. dasar-dasar ini bisa berupa data statistik, temuan eksperimental, kesaksian ahli, atau akal sehat. Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan merupakan jawaban atas pertanyaan: pengetahuan apa yang relevan dengan klaim?.
- ❖ **Warrant.** Pembeneran adalah alasan untuk mendukung klaim. Pembeneran dapat berasal dari teori ekonomi, prinsip etika, ide politik, atau otoritas profesional. Sebuah pembeneran menjawab pertanyaan "mengapa alasan ini mendukung klaim?" jenis pembeneran sangat mungkin berbeda, tergantung dengan argumen yang dibuat dalam berbagai disiplin ilmu dan profesi. Misalnya, ilmu hukum menggunakan perbandingan kasus dan aturan pembuktian, sedangkan ilmu ekonomi menggunakan teori dan hukum komponen seperti hukum berkurangnya utilitas uang.
- ❖ **Qualifier.** Kesimpulan mengekspresikan derajat dimana analisis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, retorika sering diekspresikan dalam bahasa probabilitas seperti: "barangkali", "sangat mungkin", "tingkat kepercayaan sebesar 99% dengan margin error 0,01", dll.
- ❖ **Backing.** Dukungan adalah alasan tambahan untuk memperkuat pembeneran. Dukungan bagi pembeneran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembeneran yang tidak diterima. Dukungan terhadap pembeneran dapat berbentuk: hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis.

- ❖ **Rebuttal.** Bantahan merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim asli tidak diterima atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu. Secara keseluruhan klaim kebijakan dan bantahan membentuk substansi isu-isu kebijakan, yaitu ketidaksepakatan diantara segemen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah. pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis mengantisipasi tujuan-tujuan dan menyediakan perangkat sistematis untuk mengkritik salah satu klaim, asumsi, dan argumennya.
- ❖ **Objection.** Keberatan menentang pengetahuan, pembenaran, dukungan, atau kesimpulan dengan mengidentifikasi kondisi khusus atau pengecualian yang mengurangi kepercayaan pada kebenaran pengetahuan, pembenaran, dukungan, atau kesimpulan. Keberatan, yang dimulai dengan kata tetapi, menjawab pertanyaan: apakah ada keadaan khusus atau pengecualian yang mengancam kredibilitas pembenaran? Analisis yang memasukkan keberatan ke dalam analisis mereka lebih cenderung mengadopsi perspektif kritis terhadap suatu masalah dengan mengidentifikasi asumsi yang lemah atau tersembunyi, mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan, atau mempertanyakan kemungkinan sanggahan terhadap keberatan.



# Kontekstualisasi Argumen Kebijakan



**TERIMA KASIH**



# Model Analisis Kebijakan Publik

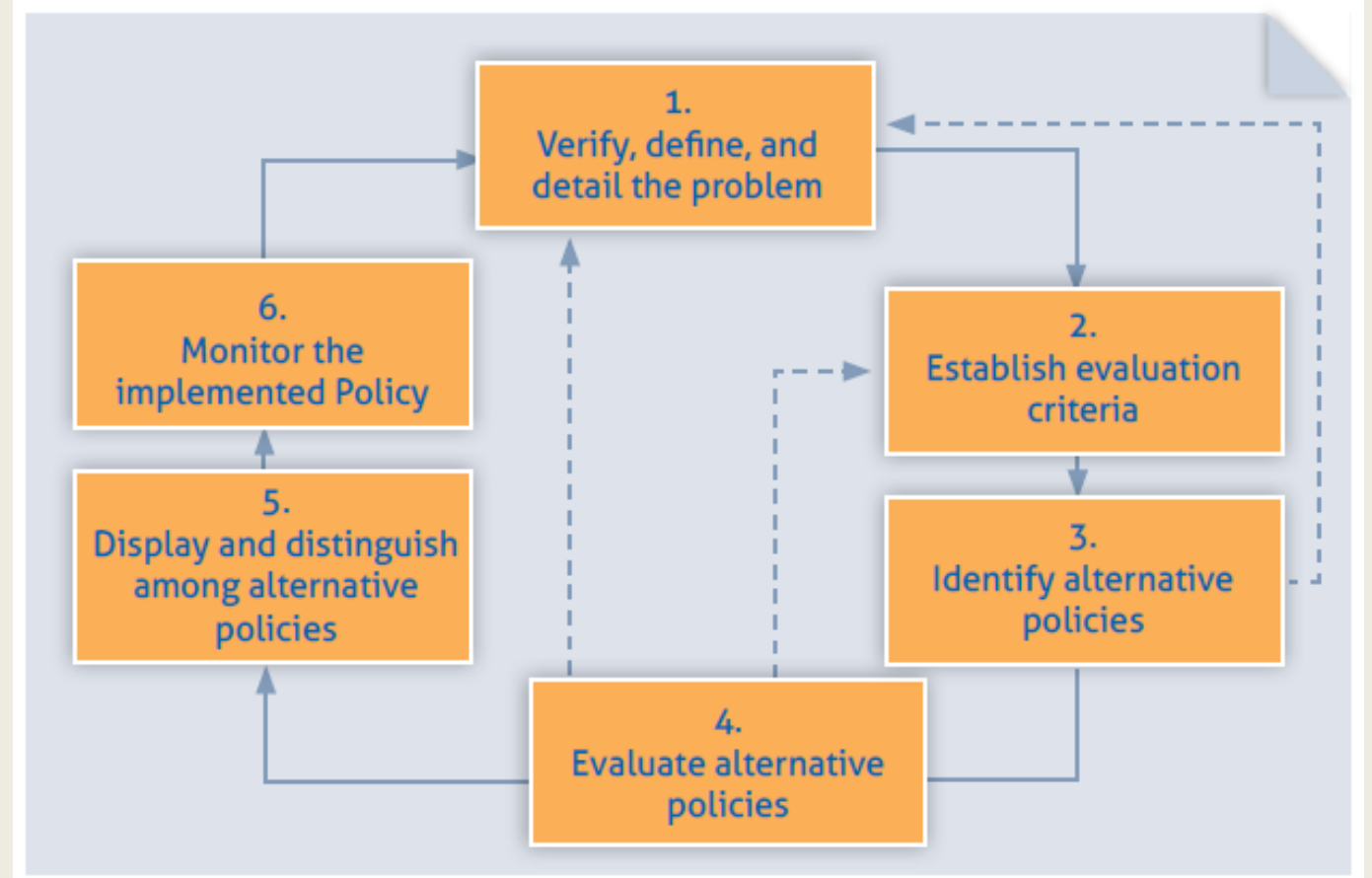
---

Abdul Rahman, S.AP., M.A.

# MODEL-MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

## 1. Model Patton & Sawicki

1. Menentukan atau mendefinisikan masalah kebijakan dengan cara menganalisis data dan informasi yang relevan dengan masalah tersebut.
2. Mengidentifikasi atau mengembangkan kriteria-kriteria untuk pemecahan masalah. Dalam hal ini, seorang pengambil kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor terkait sebelum memutuskan sesuatu.
3. Membuat daftar alternatif yang akan dipilih sebagai kebijakan terbaik dalam menyelesaikan masalah kebijakan.
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap kriteria yang dikembangkan dalam kebijakan, dengan memberikan bobot terhadap setiap kriteria.
5. Melakukan evaluasi terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian memilih alternatif terbaik sebagai kebijakan terpilih.
6. Menjalankan & mengawasi kebijakan yang telah dipilih.



Sumber: Patton & Sawicki dalam LAN (2015:169)

## 2. Model Thomas R. Dye

### 2.1 Model Proses (Kebijakan sebagai Proses Politik)

TABLE 2-1 The Policy Process

- *Problem Identification.* The identification of policy problems through demand from individuals and groups for government action.
- *Agenda Setting.* Focusing the attention of the mass media and public officials on specific public problems to decide what will be decided.
- *Policy Formulation.* The development of policy proposals by interest groups, White House staff, congressional committees, and think tanks.
- *Policy Legitimation.* The selection and enactment of policies through actions by Congress, the president, and the courts.
- *Policy Implementation.* The implementation of policies through government bureaucracies, public expenditures, regulations, and other activities of executive agencies.
- *Policy Evaluation.* The evaluation of policies by government agencies themselves, outside consultants, the media, and the general public.

**1. Identifikasi Masalah.**  
Identifikasi masalah kebijakan melalui permintaan dari individu dan kelompok untuk dilakukannya tindakan pemerintah.

**2. Pengaturan Agenda.**  
Memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik pada masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang akan diputuskan.

**3. Perumusan Kebijakan.**  
Pengembangan proposal kebijakan oleh kelompok kepentingan, jajaran eksekutif, legislatif, dan wadah pemikir.

**4. Legitimasi Kebijakan.**  
Pemilihan dan pemberlakuan kebijakan melalui tindakan legislatif, presiden, dan pengadilan.

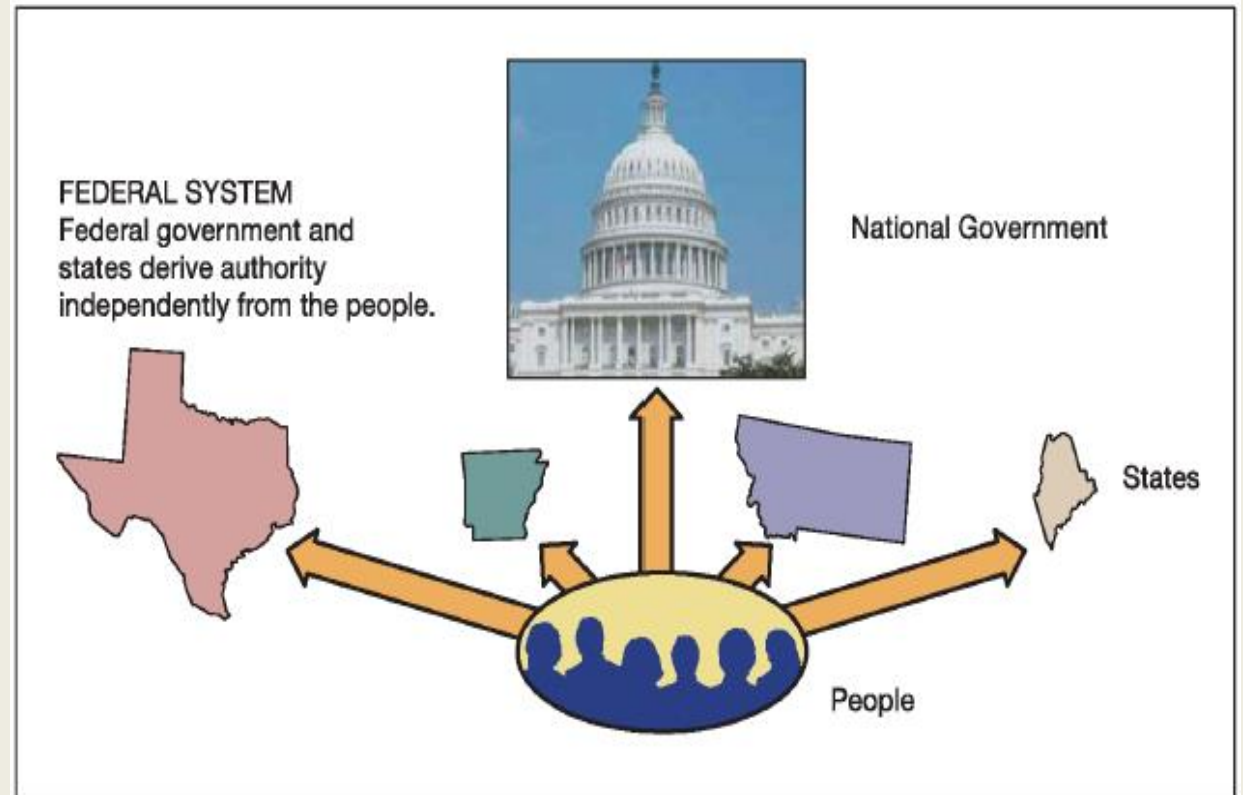
**5. Implementasi Kebijakan.**  
Pelaksanaan kebijakan melalui birokrasi pemerintahan, belanja publik, regulasi, dan kegiatan badan eksekutif lainnya.

**6. Evaluasi Kebijakan.**  
Evaluasi kebijakan oleh instansi pemerintah sendiri, konsultan luar, media, dan masyarakat umum.

Sumber: Thomas R. Dye (2013:16-17)

## 2.2 Model Institusional (Kebijakan sebagai *Output* Institusional)

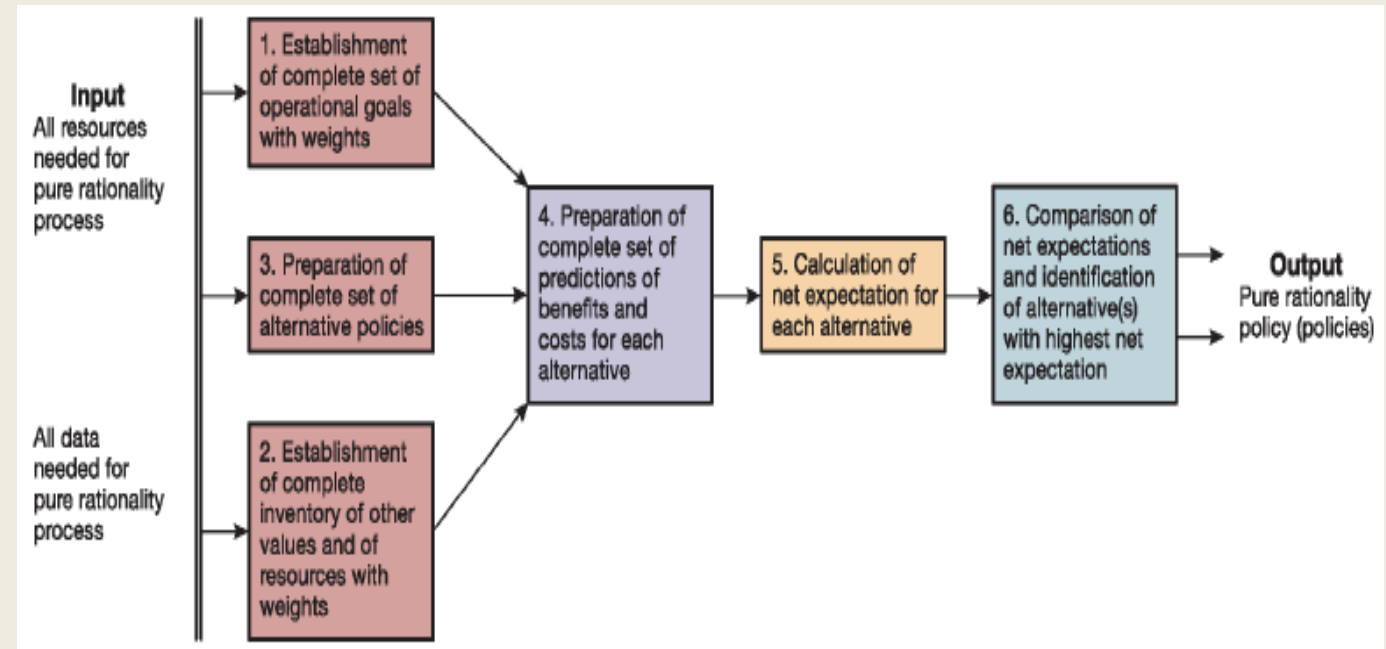
1. Model institusional menitikberatkan prinsip pembagian kekuasaan pada 3 lembaga utama negara (eksekutif, legislatif & yudikatif) beserta Pemerintah Daerah/Negara Bagian/Federal untuk mengeluarkan suatu kebijakan.
2. Analisis kebijakan publik dilakukan dengan mengkaji kesesuaian setiap produk kebijakan yang dikeluarkan ketiga lembaga tersebut dan Pemerintah Daerah/Negara Bagian/Federal dengan substansi & nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi sebuah negara. Misal: UUD 1945 di Indonesia, *The Supreme Law of The Land* di Amerika Serikat.



Sumber: Thomas R. Dye (2013:18)

## 2.3 Model Rasional (Kebijakan sebagai Keuntungan Sosial Maksimum)

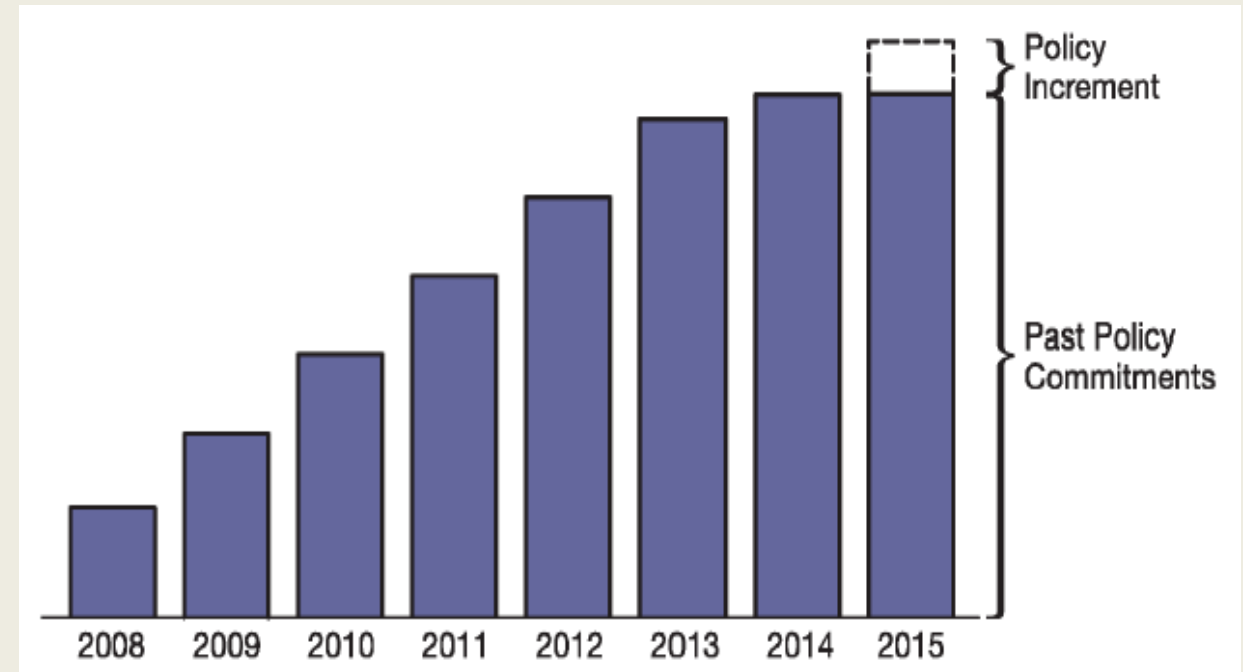
1. Kebijakan rasional adalah kebijakan yang mencapai "keuntungan sosial maksimum"; artinya, pemerintah harus memilih kebijakan yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.
2. Terdapat 2 pedoman penting dalam definisi keuntungan sosial maksimum: *Pertama*, tidak ada kebijakan yang harus diambil jika biayanya melebihi manfaatnya. *Kedua*, di antara alternatif kebijakan, pengambil keputusan harus memilih kebijakan yang menghasilkan keuntungan terbesar daripada biaya.
3. Pembuat kebijakan hendaknya tidak memandang rasionalisme dalam kerangka dolar dan sen yang sempit, sehingga nilai-nilai sosial dasar dikorbankan. Namun, harus melibatkan penghitungan semua nilai sosial, politik, dan ekonomi yang dikorbankan atau dicapai oleh suatu kebijakan publik, tidak hanya yang dapat diukur dalam dolar.
4. Untuk memilih kebijakan yang rasional, pembuat kebijakan harus a) Mengetahui semua preferensi nilai masyarakat dan bobot relatifnya, b) Mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia, c) Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan, d) Menghitung rasio manfaat terhadap biaya untuk setiap alternatif kebijakan, dan e) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.



Sumber: Thomas R. Dye (2013:18-20)

## 2.4 Model Inkremental (Kebijakan sebagai Perbaikan Masa Lalu)

1. Inkrementalisme memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya modifikasi tambahan.
2. Model inkremental dibuat sebagai kritik atas model rasional pengambilan keputusan yang dipandang tidak efisien karena harus: a) Meninjau seluruh spektrum kebijakan yang ada dan yang diusulkan; b) Mengidentifikasi tujuan masyarakat secara holistik; c) Meneliti manfaat dan biaya alternatif kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan, dan d) Menyusun urutan preferensi untuk setiap alternatif kebijakan dalam hal jaring maksimum.
3. Inkrementalisme bersifat konservatif karena program, kebijakan, dan pengeluaran yang ada (eksisting) dianggap sebagai basis dalam peningkatan, penurunan, atau modifikasi.
4. Pembuat kebijakan melakukan ini karena mereka tidak punya waktu, informasi, atau uang untuk menyelidiki semua alternatif kebijakan yang ada. Biaya mengumpulkan semua informasi ini terlalu besar.
5. Selain itu, mereka juga tidak dapat menghitung rasio biaya-manfaat untuk alternatif kebijakan ketika banyak nilai politik, sosial, ekonomi, dan budaya dipertaruhkan.

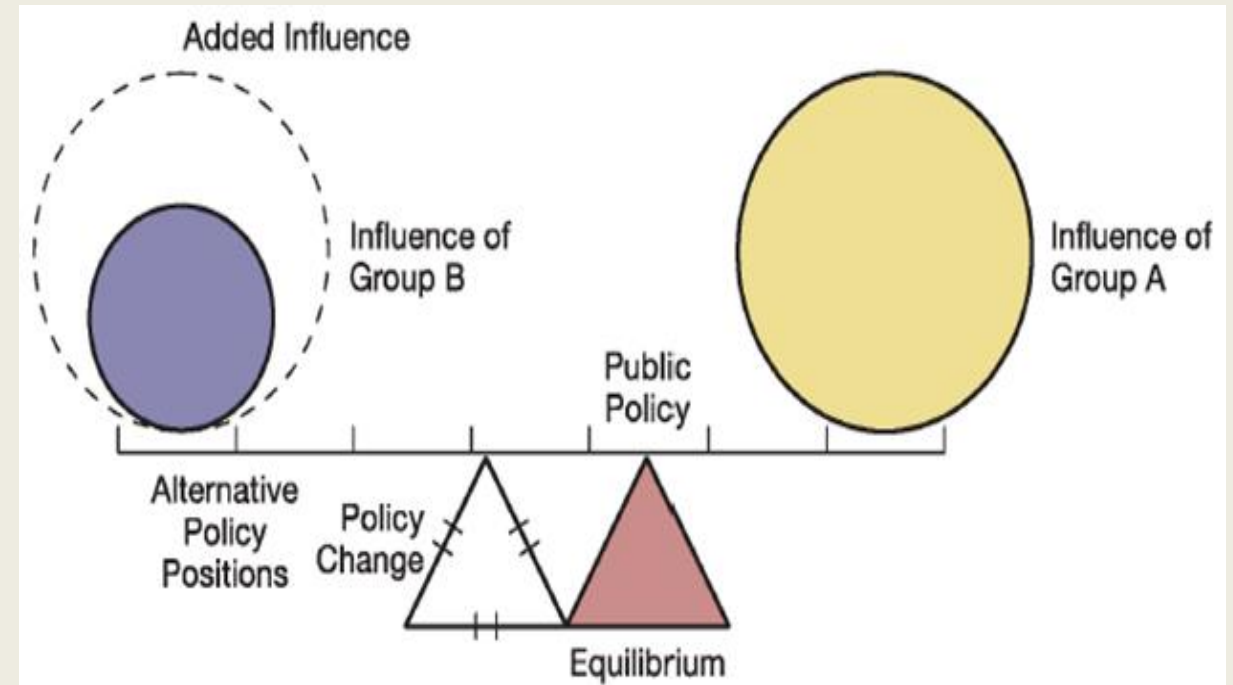


Sumber: Thomas R. Dye (2013:21-22)



## 2.5 Model Grup (Kebijakan sebagai Keseimbangan dalam Perjuangan Kelompok)

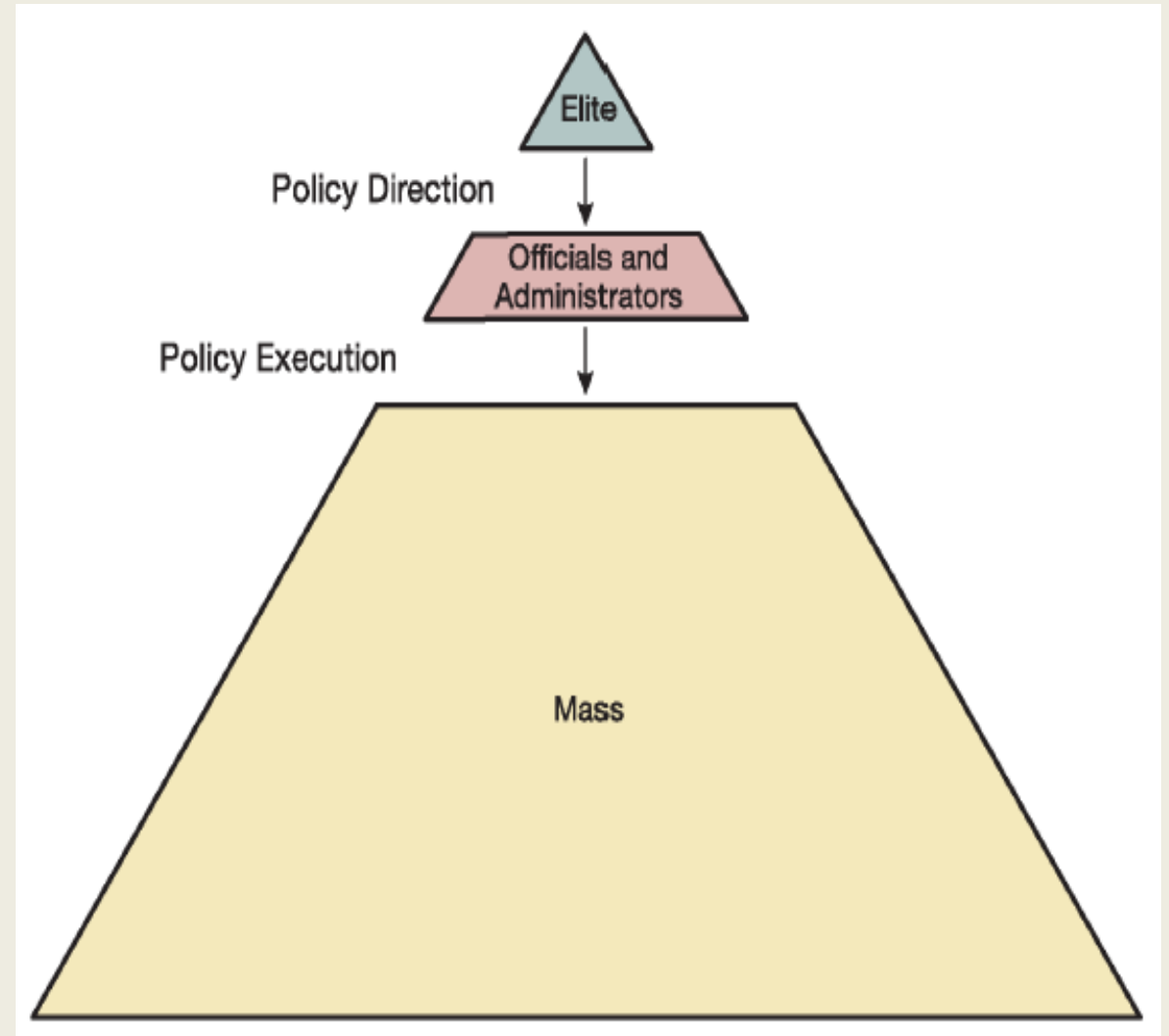
1. Menurut teori kelompok, kebijakan publik pada waktu tertentu adalah keseimbangan (ekuilibrium) yang dicapai dalam perjuangan kelompok (lihat gambar).
2. Ekuilibrium ini ditentukan oleh pengaruh relatif dari berbagai kelompok kepentingan. Perubahan pengaruh relatif dari setiap kelompok kepentingan dapat diharapkan menghasilkan perubahan dalam kebijakan publik; kebijakan akan bergerak ke arah yang diinginkan oleh kelompok yang memperoleh pengaruh dan menjauhi keinginan kelompok yang kehilangan pengaruh. Pengaruh kelompok ditentukan oleh jumlah, kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, akses ke pengambil keputusan, dan kohesi internal.
3. Terdapat beberapa kekuatan dalam model grup: **Pertama, kelompok besar.** Kelompok ini hampir universal yang cenderung mendukung sistem konstitusional dan aturan main yang berlaku. Grup ini tidak selalu terlihat tetapi dapat diaktifkan untuk memberikan teguran yang luar biasa kepada grup mana pun yang menyerang sistem dan mengancam untuk menghancurkan keseimbangan. **Kedua, kelompok yang tumpang tindih** yang membantu menjaga keseimbangan dengan mencegah salah satu kelompok bergerak terlalu jauh dari nilai-nilai yang berlaku. Fakta ini memoderasi tuntutan kelompok yang harus menghindari menyinggung anggotanya yang memiliki afiliasi kelompok lain.



Sumber: Thomas R. Dye (2013:22-23)

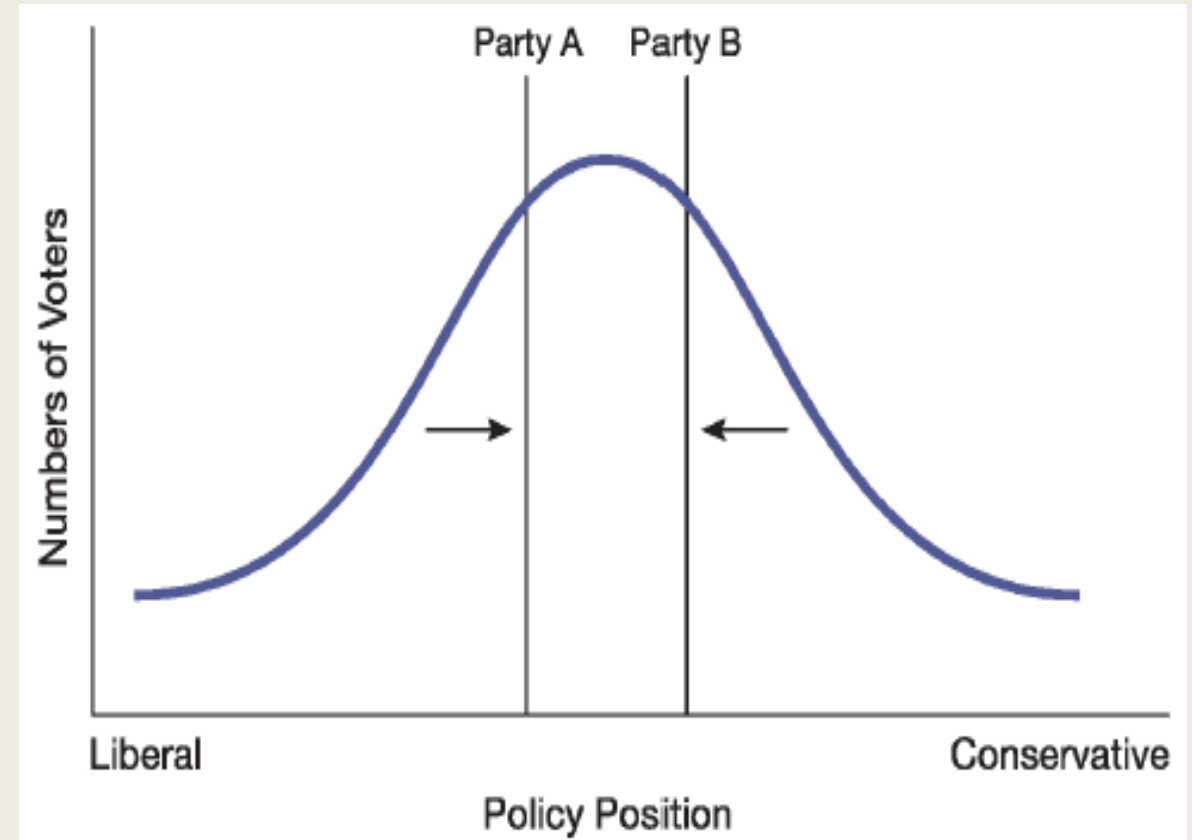
## 2.6 Model Teori Elit (Kebijakan sebagai Preferensi Elit)

1. Meskipun sering ditegaskan bahwa kebijakan publik mencerminkan tuntutan "rakyat", namun **kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai preferensi dan nilai-nilai elit** pemerintahan.
2. Hal ini dapat terjadi karena **elit sebenarnya membentuk opini publik tentang masalah kebijakan lebih dari publik membentuk opini elit**. Dengan demikian, kebijakan publik ternyata benar-benar menjadi preferensi para elit. Sementara **pejabat publik dan penyelenggara hanya menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh elit**.
3. Akhirnya, **kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan massa** melainkan nilai-nilai elit yang berlaku. Perubahan kebijakan publik akan bersifat inkremental daripada revolusioner.



## 2.7 Model Pilihan Publik (Kebijakan sebagai Keputusan Kolektif oleh Individu-individu yang Berkepentingan)

1. Teori pilihan publik mengasumsikan bahwa **individu dan organisasi berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri** dalam politik; misalnya, partai dan kandidat yang pandangan kebijakannya mungkin sangat Liberal atau konservatif bergerak ke pusat pada saat pemilihan untuk memenangkan suara terbanyak.
2. Teori pilihan publik membantu menjelaskan **mengapa partai politik dan kandidat kontestan elektoral gagal menawarkan alternatif kebijakan yang jelas** dalam kampanye pemilu. Hal ini karena mereka **tidak tertarik untuk memajukan gagasan, tetapi lebih pada memenangkan pemilu**. Mereka merumuskan posisi kebijakan mereka untuk memenangkan pemilihan, namun tidak memenangkan pemilu untuk merumuskan kebijakan.
3. Teori pilihan publik mengakui bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi tertentu yang tidak dapat ditangani pasar, seperti: a) Menyediakan barang-barang dan jasa publik yang harus dipasok kepada semua orang; dan b) Menanggulangi eksternalitas dan kegagalan pasar/ekonomi.



*Sumber: Thomas R. Dye (2013:25-27)*

## 2.8 Model *Game Theory* (Kebijakan sebagai Pilihan Rasional dalam Situasi Kompetitif)

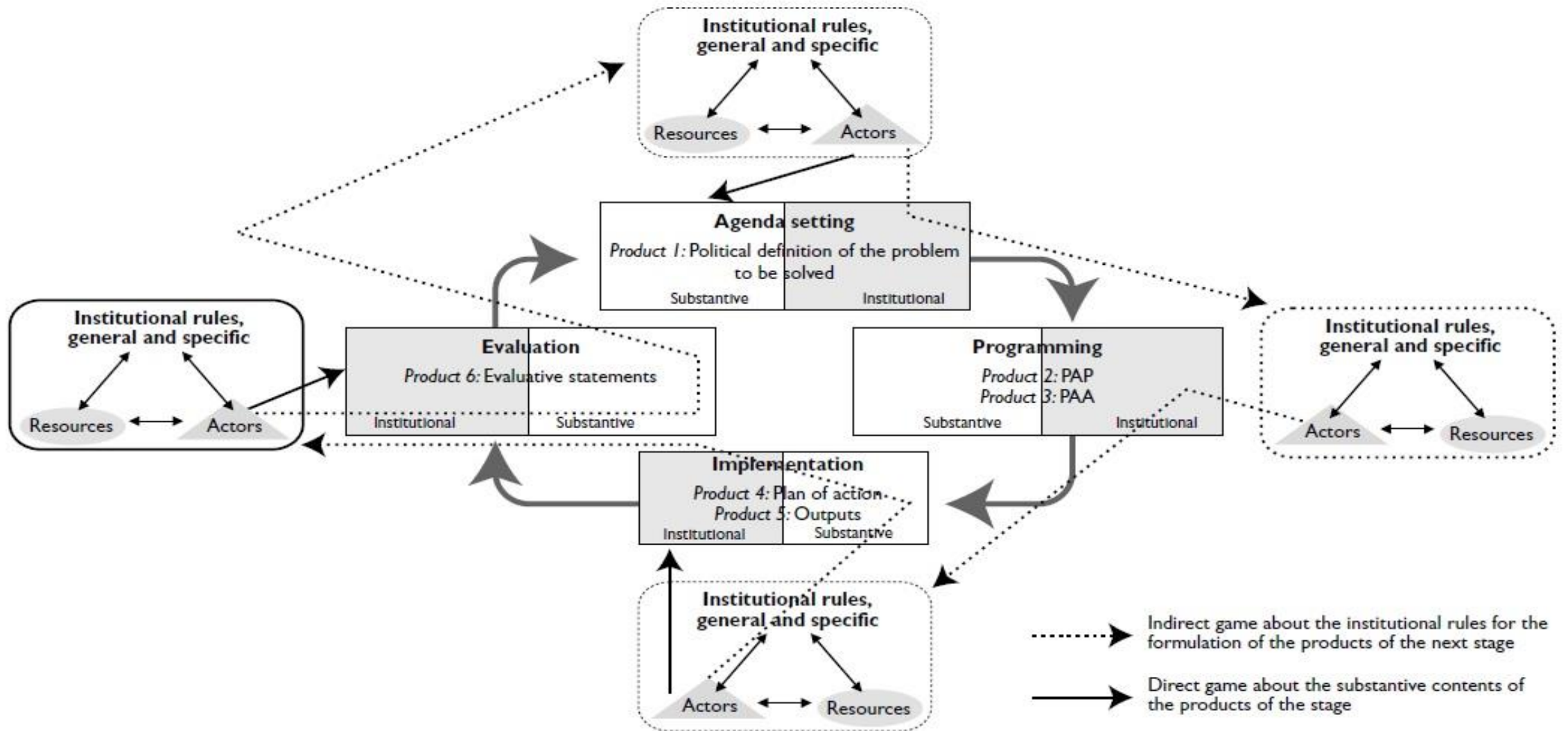
1. Teori permainan adalah studi tentang keputusan dalam situasi dimana dua atau lebih peserta rasional memiliki pilihan untuk dibuat dan hasilnya tergantung pada pilihan yang dibuat oleh masing-masing.
2. Model ini diterapkan pada bidang-bidang dalam pembuatan kebijakan, dimana tidak ada pilihan independen "terbaik" yang dapat dibuat oleh seseorang dan hasil "terbaik" bergantung pada apa yang dilakukan orang lain.
3. Teori permainan dapat diterapkan pada keputusan tentang: perang dan perdamaian, penggunaan senjata nuklir, diplomasi internasional, perundingan dan pembangunan koalisi di Kongres atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berbagai situasi politik penting lainnya.
4. Satu pemain mungkin lebih memilih kematian daripada tidak hormat dalam permainan. Setiap pemain harus mencoba menghitung nilai yang lain, dan tidak ada yang memiliki informasi lengkap tentang nilai lawan. Selain itu, menggertak atau kesalahan penyajian nilai atau sumber daya seseorang kepada lawan selalu merupakan kemungkinan.

		<i>DRIVER A'S CHOICES</i>	
		<i>Stay on Course</i>	<i>Veer</i>
<i>DRIVER B'S CHOICES</i>	<i>Stay on course</i>	A: -10 B: -10	A: -5 B: +5
	<i>Veer</i>	A: +5 B: -5	A: -1 B: -1

**A Game-Theoretic Matrix for the Game of Chicken** Game theory suggests that policymakers, or "players," adjust their conduct to reflect not only their own preferences but also the likely choices of opponents.

### 3. Model Peter Knoepfel et. al,

Theoretical model for the analysis of a public policy



# STRATEGI PENGGUNAAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

**1. Order and Simplify Reality**  
(Urutkan dan Sederhanakan Realitas)

**2. Identify What Is Significant**  
(Identifikasi Apa yang Signifikan)

**3. Be Congruent with Reality**  
(Selaras dengan Realitas)

**4. Provide Meaningful Communication**  
(Mengakomodasi Komunikasi yang Berarti)

**5. Direct Inquiry and Research**  
(Penyelidikan dan Penelitian Langsung)

**6. Suggest Explanations**  
(Penjelasan Hipotesis)

*Sumber: Thomas R. Dye (2013:29-30)*



TERIMA KASIH